



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi yang akan dicapai melalui misi yang telah ditetapkan.

Renstra ini secara garis besar memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, target dan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang ditetapkan. Harapan kami semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja khususnya kepada publik dan pembangunan nasional pada umumnya.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2025
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	11
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81
3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.....	81
3.2 Startegi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah.....	87
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	98
BAB V PENUTUP.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinasi, fasilitasi serta administrasi pemerintahan yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui Penyelenggaraan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu penyusunan RPJPD wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Tahun 2025-2045 (Pasal 10 Ayat 2) dengan mengusung Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dimana terdapat 5 sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi 5 sasaran Visi Daerah. Selanjutnya terdapat 8 Misi Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang akan menjadi misi daerah beserta Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dengan 45 Indikator Utama Pembangunan menjadi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok di Daerah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 didasari kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dengan perkada menjadi pedoman kepala sekretariat daerah dalam menyusun renja sekretariat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap sekretariat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Renstra Sekretariat Daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beriku target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum sekretariat daerah/lintas sekretariat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Sekretariat Daerah dengan Renstra Sekretariat Daerah.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Sekretariat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Visi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1.2.1** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- 1.2.2** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 1.2.3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.4** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 1.2.5** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 1.2.6** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.7** Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tanggung jawab Kepala Daerah (Setiap Daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 bulan setelah Kepala Daerah dilantik)
- 1.2.8** Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 1.2.9** Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

- 1.2.10** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
- 1.2.11** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029’,
- 1.2.12** Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
- 1.2.13** Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
- 1.2.14** Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
- 1.2.15** Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman bagi seluruh Biro Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (Lima) Tahun. Oleh karena itu, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini di maksudkan untuk :

- a.** Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b.** Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrument evaluasi kinerja organisasi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan terpilih.
- c.** Untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinat administratif pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
- d.** Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan teratur.
- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu Tahun 2025-2029.
- g. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu sampai Tahun 2029.
- h. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah
- b. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- c. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja.
- d. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- f. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun dokumen rencana kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu tahun 2025-2029.
- g. Menentukan strategis untuk pengelolaan kerberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

1. Gambaran Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- b. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
 - e. Mitra Perangkat Daerah
 - f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - g. Kerjasama Daerah
2. Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk mengatur tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
4. Pelayanan administrasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksanaan;
6. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan Prasarana dan Sarana Pemerintah Provinsi; dan
7. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang di berikan oleh Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga asisten yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 2. Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari :
 1. Biro Perekonomian
 2. Biro Administrasi Pembangunan
 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi Dan Umum yang terdiri dari :
 1. Biro Organisasi
 2. Biro Umum Dan Perlengkapan
 3. Biro Humas dan Protokol

Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantuan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
 - b. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah ;

- c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoodinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota. Biro hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
 - b. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota

- d. Pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pemuda dan olahraga ;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan. Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur Sumatera Selatan sesuai arahan dengan tugas dan fungsinya.

5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- c. Pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- d. Pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- e. Pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Biro Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan berkaitan dengan tugasnya.
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantuan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur. Biro Organisasi

mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur ;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah. Biro Umum Dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

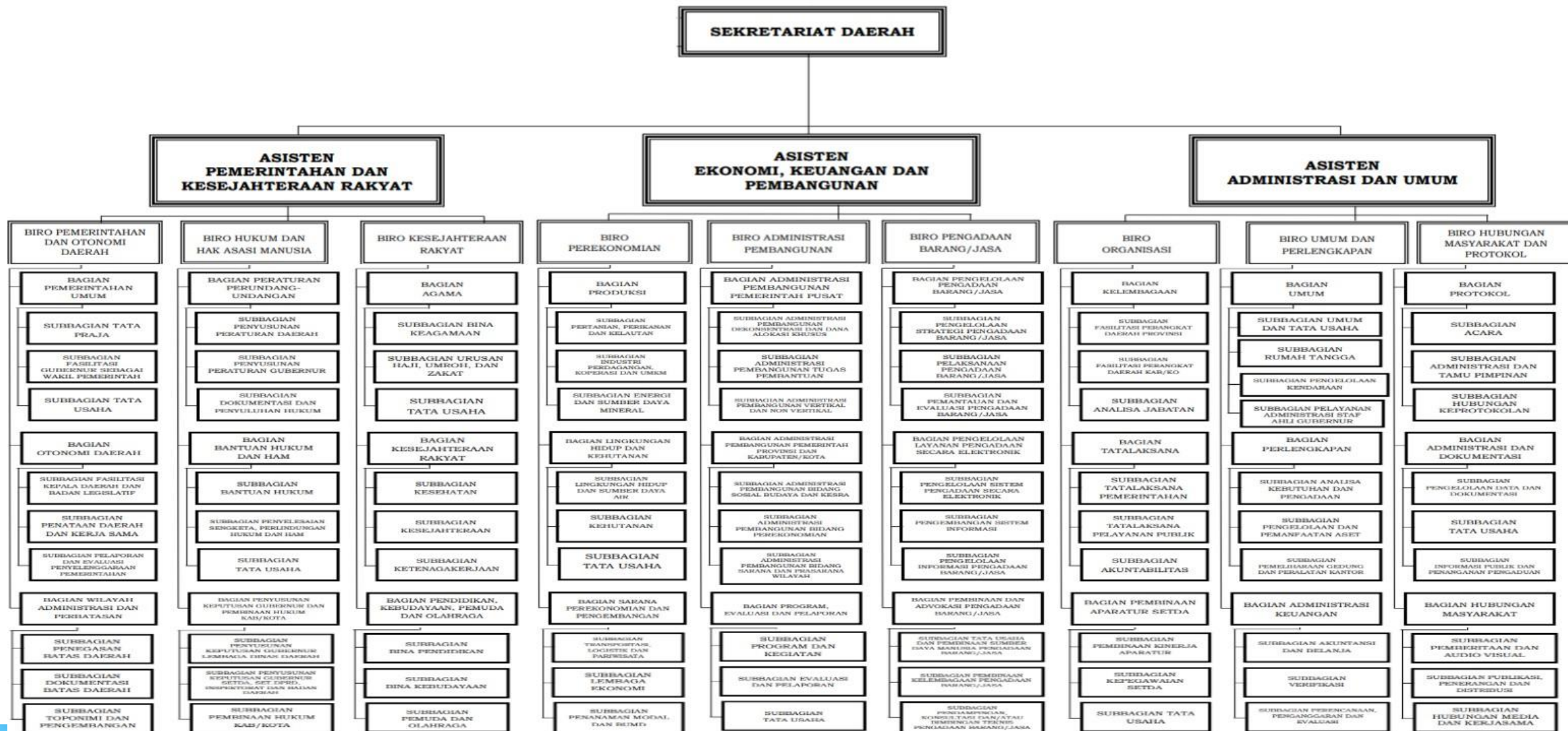
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan informasi publik;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, protokol pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Struktur Organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI



2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia yang merupakan aparaturnya yang ada di Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian Biro-Biro Setda
Provinsi Sumatera Selatan

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN
1	2	3		4		5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda(IV/c)	= 1 Orang	S.3 = 1	Orang	Perempuan
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
3		= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki	
4	Kepala Sub Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
5		Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
6		= 1	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
7		PenataTingkat I (III/d)	= 4	S.1 = 4	Orang	Laki-Laki
8		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
9		Penata (III/c)	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
11		= 3 Orang	S.2 = 3	Orang	Perempuan	
12		= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki	
13		= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki	
14		Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Laki-Laki
15		= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan	
16		= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki	
17		Penata Muda (III/a)	= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki
18		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
19		Pengatur (II/c)	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
20		= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan	
		Jumlah.....	27 Orang	27 Orang		
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 8 Orang	S.1 = 8	Orang	Laki-Laki
22		= 6 Orang	S.1 = 6	Orang	Perempuan	
23		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	= 3 Orang	SMU= 3	Orang	Laki-Laki
25			Jumlah.....	21 Orang	21 Orang	
26	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
27		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
28		Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan
		Jumlah.....	3 Orang	3 Orang		
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	= 2 Orang	SMU= 2	Orang	Perempuan	
		Jumlah.....	2 Orang	2 Orang		
30	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
		Jumlah.....	1 Orang	1 Orang		
31	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki	
		= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
		Jumlah.....	3 Orang	3 Orang		

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3		4	5
1	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki : 1 Orang
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 2 Orang	Laki-Laki : 2 Orang
		Jaksa Utama Pratama(IV/b)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan : 1 Orang
3		Pembina (IV/a)	= 1 Orang		
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 2 Orang	S.2 = 6 Orang	Laki-laki : 1 Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	= 4 Orang	S.1 = 3 Orang	Perempuan : 8 Orang
6		Penata (III/c)	= 2 Orang		
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	= 1 Orang		
10	Staff	Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 4 Orang	Laki-Laki : 4 Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	= 1 Orang	S.1 = 4 Orang	Perempuan : 7 Orang
12		Penata (III/c)	= 3 Orang	SMA = 3 Orang	
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	= 4 Orang		
14		Penata Muda (III/a)	= 1 Orang		
15		Pengatur Tk.I (II/d)	= 1 Orang		
Jumlah			24 Orang	24 Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 6 Orang	S.1 = 6 Orang	Laki-Laki : 4 Orang
23		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan : 6 Orang
24		Golongan V	= 3 Orang	SMA = 3 Orang	
Jumlah			10 Orang	10 Orang	
26	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan V	= 2 Orang	SMA = 2 Orang	Perempuan : 1 Orang
Jumlah			2 Orang	2 Orang	
30	Menunggu pengumuman Tampungan BKN		= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Laki-Laki : 1 Orang
Jumlah			1 Orang	1 Orang	
31	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)	PPPK Tahap I	= 10 Orang	S.1 = 14 Orang	Laki-Laki : 3 Orang
		PPPK Tahap II	= 4 Orang		Perempuan : 11 Orang
Jumlah			14 Orang	14 Orang	
32	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)Tidak Masuk Database BKN		= 3 Orang	S.1 = 3 Orang	Perempuan : 3 Orang
Jumlah			3 Orang	3 Orang	

3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3		4	5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1 Orang	S.3 = 1 Orang	Laki-Laki : 1 Orang
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 3 Orang	S.2 = 3 Orang	Laki-Laki : 3 Orang
		Pembina Tingkat I (IV/b)	=		
3		Pembina Tingkat I (IV/b)	=		
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 5 Orang	S.2 = 5 Orang	Laki-laki : 4 Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	= 3 Orang	S.1 = 3 Orang	Perempuan : 4 Orang
6		Penata (III/c)	= Orang		
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	= Orang		
10	Staff	Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 5 Orang	Laki-Laki : 10 Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	= 12 Orang	S.1 = 11 Orang	Perempuan : 10 Orang
12		Penata (III/c)	= 4 Orang	D3 = 1 Orang	
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	= - -	SMA = 3 Orang	
14		Penata Muda (III/a)	= - -		
		Pengatur Tk.I (II/d)	= 1 Orang		
15		Pengatur Muda Tk.I (II/b)	= 2 Orang		
Jumlah			32 Orang	32 Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 10 Orang	S.1 = 10 Orang	Laki-Laki : 8 Orang
23		Golongan VII	= 2 Orang	D.3 = 2 Orang	Perempuan : 6 Orang
24		Golongan V	= 2 Orang	SMA = 2 Orang	
Jumlah			14 Orang	14 Orang	
26	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan IX	= 10 Orang	S.I = 10 Orang	Laki-Laki : 3 Orang
		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan : 8 Orang
Jumlah			11 Orang	11 Orang	
30	Menunggu pengumuman Tampungan BKN		= - -	- = - Orang	- - Orang
Jumlah			- Orang	- Orang	
31	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)	PPPK Tahap I	= 1 Orang	SMA = - Orang	Laki-Laki : 1 Orang
		PPPK Tahap II	= - -		Perempuan : - -
Jumlah			1 Orang	- Orang	
32	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)Tidak Masuk Database BKN		= - -	S.1 = - -	Perempuan : - -
Jumlah			0 Orang	0 Orang	

4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3			4			5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
			= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Perempuan
		Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 4	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
5			= 4	Orang		= 3	Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	=		S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
7			=		S.1	= 3	Orang	Perempuan
8		Penata (III/c)	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
9		Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
13	STAFF		= 3	Orang	S.2	= 3	Orang	Laki-Laki
14		Pembina (IV/a)	= 2	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
			= 7	Orang		= 1	Orang	Perempuan
		Penata Tingkat I (III/d)			S.1	= 5	Orang	Perempuan
						1	Orang	Laki-Laki
15					S.2	1	Orang	Laki-Laki
17		Penata (III/c)	= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Perempuan
18			= 4	Orang	S.1	= 2	Orang	Perempuan
		Penata Muda Tingkat I (III/b)			S.1	= 1	Orang	Perempuan
					SMU	= 1	Orang	Perempuan
		Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	Perempuan
JUMLAH			= 33	Orang		= 33	Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 3	Orang	S.1	= 3	Orang	Perempuan
22			= 2	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
23		Golongan VII	=			1	Orang	Laki-Laki
24	JUMLAH		5	Orang		5	Orang	
27	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 2	Orang	S.1	1	Orang	Perempuan
28						1	Orang	Laki-Laki
		Golongan VII	= 1	Orang	D.3	1	Orang	Laki-Laki
		Golongan V	= 2	Orang	SMU	1	Orang	Laki-Laki
					1	Orang	Perempuan	
	JUMLAH		5	Orang		5	Orang	
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan V	= 23	Orang	SMU	= 20	Orang	Laki-Laki
						3	Orang	Perempuan
	JUMLAH		23	Orang		23	Orang	
30	NON ASN (Tidak Lulus Tahap II)		= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Laki-Laki
31	JUMLAH		2	Orang		2	Orang	

5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro	Pembina Tingkat I (IV/b) = 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b) = 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
3		= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a) = 5 Orang	S.2 = 5 Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d) = 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
7		= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Laki-Laki
8	Staf	Penata Tingkat I (III/d) = 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
9		= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Laki-Laki
10		Pengatur (II/d) = 1 Orang	SMU = 1 Orang	Laki-Laki
Jumlah		14 Orang	14 Orang	
11	PPPK Tahap I	Golongan IX = 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Laki-Laki
12		= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
13		Golongan VII = 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan
14		Golongan V = 1 Orang	SMU = 1 Orang	Perempuan
Jumlah		5 Orang	5 Orang	
15	PPPK Tahap II	Golongan VII = 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan
Jumlah		1 Orang	1 Orang	
16	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan IX = 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
Jumlah		1 Orang	1 Orang	
17	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap II)	Golongan IX = 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Perempuan
		Golongan IX = 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
Jumlah		3 Orang	3 Orang	
18	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)	= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan
Jumlah		1 Orang	1 Orang	

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN
1	2	3		4		5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda(IV/c)	= 1 Orang	S.3 = 1	Orang	Perempuan
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
3		= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki	
4	Kepala Sub Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
5		Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
6		= 1	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
7		PenataTingkat I (III/d)	= 4	S.1 = 4	Orang	Laki-Laki
8		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
9		Penata (III/c)	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
11		= 3 Orang	S.2 = 3	Orang	Perempuan	
12		= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki	
13		= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki	
14		Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Laki-Laki
15		= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan	
16		= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki	
17		Penata Muda (III/a)	= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki
18		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
19		Pengatur (II/c)	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
20		= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan	
Jumlah.....		27	Orang	27	Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 8 Orang	S.1 = 8	Orang	Laki-Laki
22		= 6 Orang	S.1 = 6	Orang	Perempuan	
23		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	= 3 Orang	SMU= 3	Orang	Laki-Laki
25		= 3 Orang	SMU= 3	Orang	Perempuan	
Jumlah.....		21	Orang	21	Orang	
26	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
27		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
28		Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan
Jumlah.....		3	Orang	3	Orang	
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	= 2 Orang	SMU= 2	Orang	Perempuan	
Jumlah.....		2	Orang	2	Orang	
30	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
Jumlah.....		1	Orang	1	Orang	
31	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki	
		= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
Jumlah.....		3	Orang	3	Orang	

7. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3		4	5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Madya (IV/d)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 2 Orang	S.2 = 2 Orang	Laki-Laki
3			= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
5			= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
7			= 3 Orang	S.2 = 3 Orang	Perempuan
8			= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
9			= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Perempuan
8	Analisis Kelembagaan	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
9		Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
10		Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
11		Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
12	Analisis Kinerja	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
13	Analisis Tatalaksana Pemerintahan	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
14		Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
16	Analisis Jabatan	Penata Muda Tk. I (III/b)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
17	Analisis Tatalaksana Pelayanan Publik	Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
18	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
Jumlah			24 Orang	24 Orang	
19	PPPK Tahap I		= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Laki-Laki
20		Golongan IX	= 5 Orang	S.1 = 5 Orang	Perempuan
21		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan
22		Golongan V	= 2 Orang	SMU = 2 Orang	Laki-Laki
Jumlah			10 Orang	10 Orang	
23	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Perempuan
24		Golongan V	= 1 Orang	SMU = 1 Orang	Perempuan
Jumlah			3 Orang	3 Orang	
25	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan IX	= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Laki-Laki
			= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
		Golongan V	= 3 Orang	SMU = 3 Orang	Laki-Laki
			= 5 Orang	SMU = 5 Orang	Laki-Laki
Jumlah			11 Orang	11 Orang	
31	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)		= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
Jumlah			1 Orang	1 Orang	
Jumlah Total			49 Orang	49 Orang	

**8. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi
Sumatera Selatan**

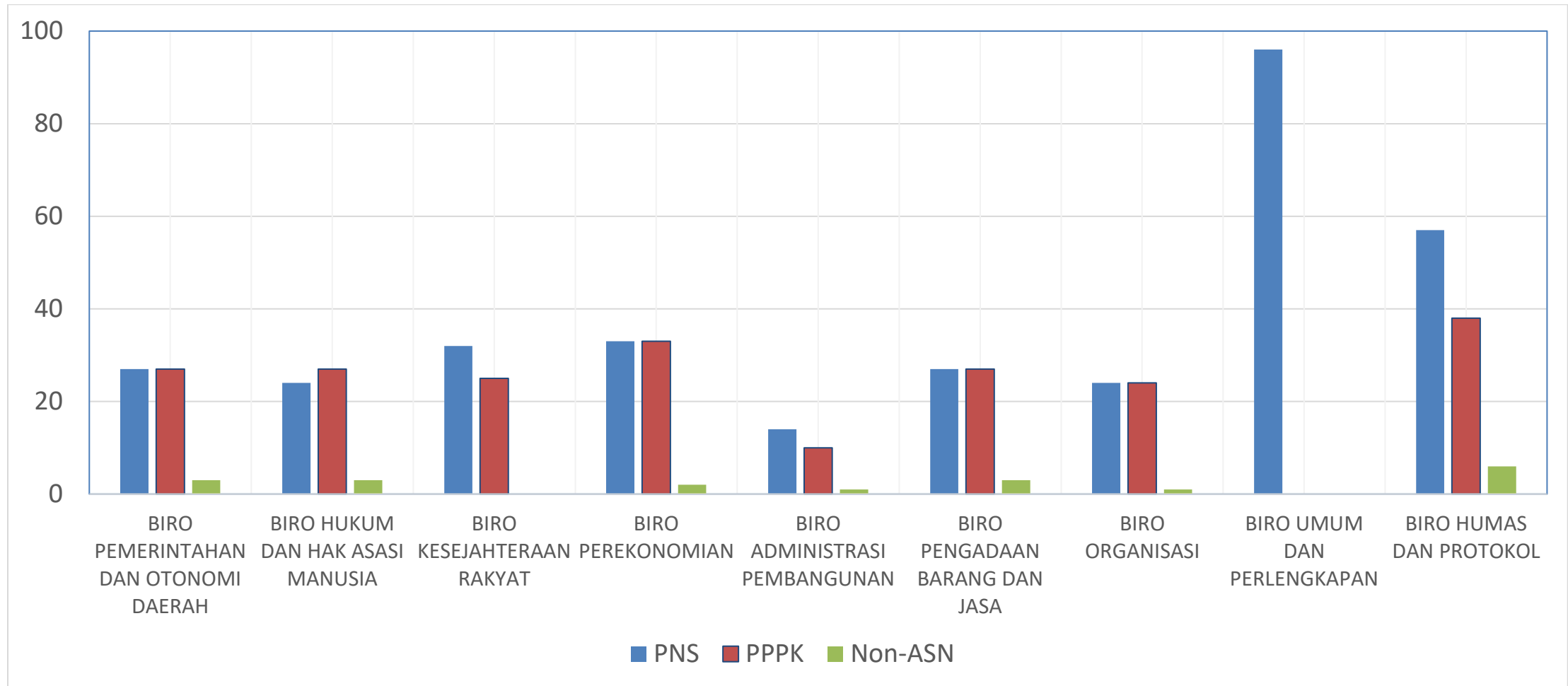
NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina = 1 Org (IV/a)	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina = 1 Org Tk.I (IV/b)	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina = 1 Org (IV/a)	S1 = 1 Org	Laki-Laki = 1 Org
		Penata Tk.I = 1 Org (III/d)	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina = 1 Org (IV/a)	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I = 5 Org (III/d)	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina = 1 Org (IV/a)	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I = 17 Org (III/d)	S2 = 6 Org S1 = 11 Org	Laki- = 7 Org lakiPerempuan = 10 Org
		Penata (III/c) = 12 Org	S2 = 2 Org S1 = 10 Org	Laki-laki = 6 Org Perempuan = 6 Org
		Penata = 14 Org Muda Tk. I (III/b)	S1 = 11 Org SLTA = 3 Org	Laki- = 10 Org lakiPerempuan = 4 Org
		Penata = 13 Org Muda (III/a)	S1 = 9 Org D III = 3 Org SLTA= 1 Org	Laki- = 10 Org lakiPerempuan = 3 Org
		Pengatur = 13 Org Tk.I (II/d)	SLTA= 13 Org	Laki-laki = 8 Org Perempuan = 5 Org
		Pengatur = 6 Org (II/c)	SLTA= 6 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 2 Org
		Pengatur = 2 Org Muda Tk.I (II/b)	SLTA= 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Pengatur = 1 Org Muda (II/a)	SLTA= 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Juru (I/c) = 2 Org	SLTP= 2 Org	Laki-laki = 2 Org

9. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	ASN	JABATAN	PANGKAT/GOL		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
1	PNS	Kepala Biro	Pembina TK.I (IV/b)	1 Org	S2	Laki-laki	1 Org
		Kepala Bagian	Pembina (IV/a)	2 Org	S2	Laki-laki	2 Org
		Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d)	2 Org	S2	Laki-laki	3 Org
			Penata (III/c)	5 Org	S1	Laki-laki	4 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1 Org	S1	Perempuan	1 Org
		Staf	Penata Tk.I (III/d)	9 Org	S2	Laki-laki	4 Org
			Penata (III/c)	12 Org	S2	Perempuan	6 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	10 Org	S1	Laki-laki	9 Org
			Penata Muda (III/a)	11 Org	S1	Perempuan	15 Org
			Pengatur Tk.I (II/d)	3 Org	D3	Laki-laki	2 Org
			Juru (I/c)	1 Org	D3	Perempuan	2 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	2 Org
					SLTP	Laki-laki	1 Org
2	PPPK TAHAP I				S1	Laki-laki	Org
					S1	Perempuan	7 Org
					D3	Laki-laki	- Org
					D3	Perempuan	4 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	4 Org
	PPPK TAHAP II				S1	Laki-laki	- Org
					S1	Perempuan	1 Org
					SLTA	Laki-laki	8 Org
					SLTA	Perempuan	- Org
	PPPK PARUH WAKTU				S1	Laki-laki	5 Org
					S1	Perempuan	3 Org
					SLTA	Laki-laki	- Org
					SLTA	Perempuan	1 Org
3	NON ASN		HONORER			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	- Org
			TKPD			Laki-laki	- Org
						Perempuan	- Org
			TENAGA IT			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	2 Org

Jumlah

Grafik 2.1.
DATA PEGAWAI TAHUN 2025



Jadi disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa biro masih membutuhkan SDM yang mana SDM pada saat ini masih terdapat kekurangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

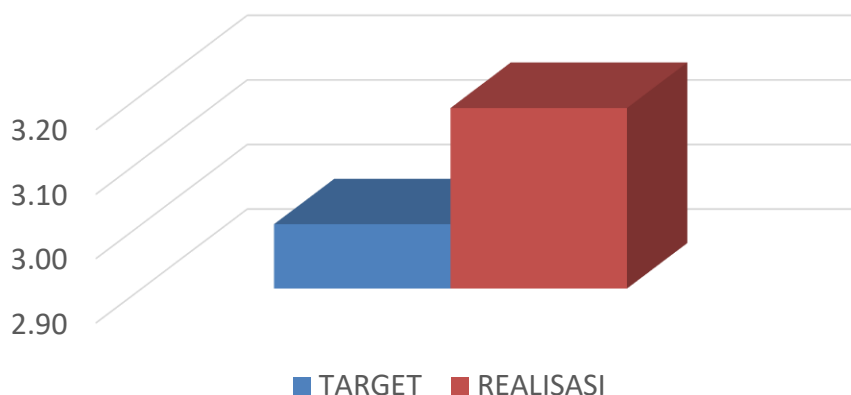
Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya , sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari tahun 2025-2029.

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2025–2029 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyampaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (**ST**) dengan angka (3,0) dengan realissasi skor (**3,18**). dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2.
 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Tahun 2023



Capaian Produk Hukum Daerah Penanganan Perkara dan HAM Jumlah Peraturan Daerah yang Di akses oleh Publik

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM Pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tercapainya persentase produk hukum 100% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

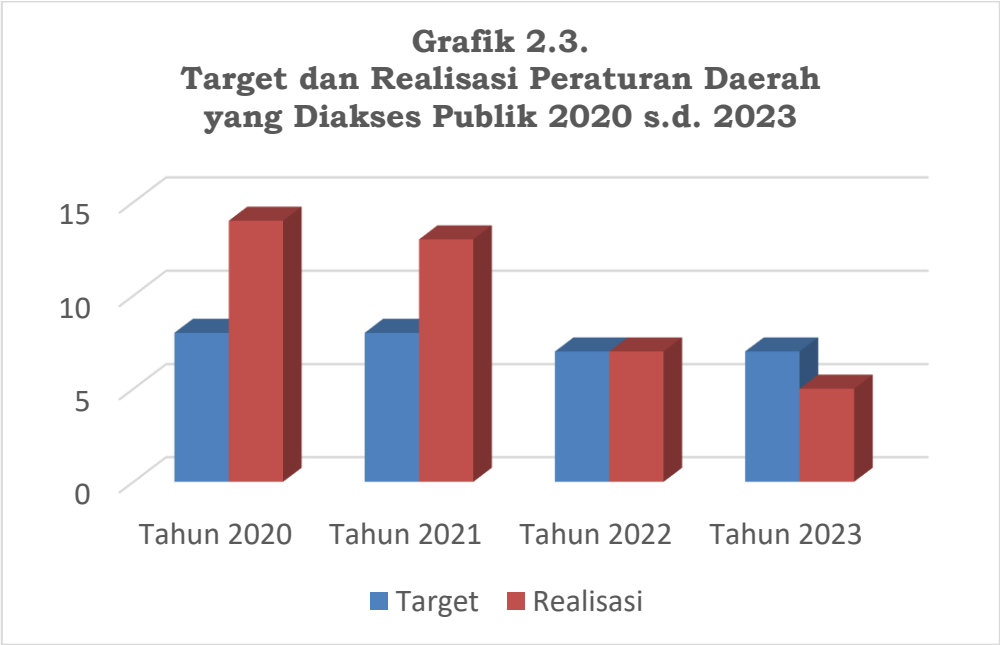
- 1) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Daerah, Target 5 Peraturan Daerah dan 9 Peraturan Daerah.
- 2) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, target 15 Peraturan Gubernur dan 31 Peraturan Gubernur.
- 3) Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 Keputusan Gubernur dan 1002 Keputusan Gubernur.
- 4) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan

- Kepala Daerah, Target 5 Perda dan Realisasi Target 9 Perda.
- 5) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, Target 15 Pergub dan Realisasi Target 31 Pergub.
 - 6) Jumlah Penelitian dan Penelahaan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 kpts dan Realisasi Target 1000 kpts.
 - 7) Jumlah Publikasi Produk Hukum Berupa Buku dan Media Cetak, Target 84 Buku dan 1 Kali Cetak serta Realisasi Target 121 Buku dan 1 Kali Cetak.
 - 8) Jumlah Publikasi Produk Hukum dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Target 110 Produk Hukum dan Realisasi Target 419 Produk Hukum.
 - 9) Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dapat di Evaluasi, Fasilitasi, dan Klarifikasi, Target 450 Produk Hukum dan Realisasi Target 681 Produk Hukum.
 - 10) Jumlah Perkara yang Menyangkut Kepentingan Pemerintah Provinsi Sumsel, Target 8 Perkara dan Realisasi Target 30 Perkara.
 - 11) Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin, Target 20 Kasus dan Realisasi Target 52 Kasus.
 - 12) Jumlah Rapat dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang di selesaikan, Target 2 Kali dan Realisasi Target 2 kali.
 - 13) Terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di 17 (Tujuh Belas) kabupaten/kota, Target 1 Kegiatan dan Realisasi Target 1 Kegiatan.
 - 14) Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Hukum, Target 5 kab/kota dan Realisasi Target

5 Kab/Kota.

- 15) Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota, Target 3 Laporan dan Realisasi Target 3 Laporan.

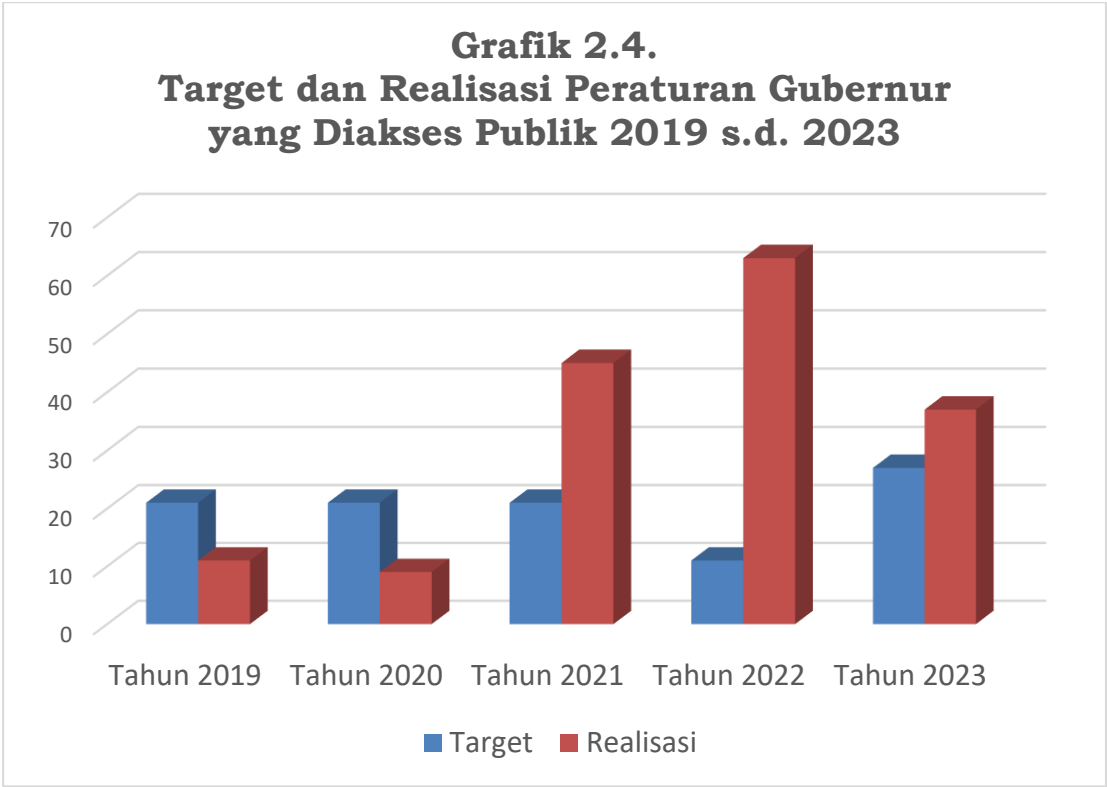
Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik Target Peraturan Daerah pada tahun 2023 target 7 (tujuh) perda dan realisasinya adalah (lima) Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 71,4% dari target yang ditetapkan. Ke semua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. (8 Peraturan Daerah) karena adanya ada kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan, dan pada Tahun 2020 Target sebesar 100% (8 Peraturan Daerah) terealisasi 90% (14 Peraturan Daerah) terjadinya peningkatan penyusunan Perda karena adanya banyaknya fasilitas penyusunan produk hukum. Sedangkan tahun 2021 target sebesar 8 Peraturan Daerah dan terealisasi 13 Peraturan Daerah, tahun 2022 target sebesar 7 Peraturan Daerah dan terealisasi 7 Peraturan Daerah serta tahun 2023 target sebanyak 7 (tujuh) terealisasi 5 (lima). Dapat dilihat pada grafik dibawah ini bisa dilihat peningkatan setiap tahunnya jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh publik. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik Peraturan Gubernur pada Tahun 2023 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 37 (tiga puluh tujuh) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 137,03% dari target yang ditetapkan. Kesemua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.

Capaian indikator persentase jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik pada Tahun 2019 mencapai 11 dan Tahun 2020 mencapai 9 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 97,6% dari target hingga Tahun 2020 yaitu sebanyak 21 produk hukum daerah dan tahun 2021 mencapai 125,93% Capaian indikator persentase jumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat diakses oleh publik Tahun 2021 mencapai 45 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 1,69% dari target hingga Tahun 2021 yaitu sebanyak 97 produk hukum daerah

dan capaian indikator persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh publik Tahun 2022 dengan target 110 (seratus sepuluh) dan realisasinya mencapai 43 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 574,54% dari target produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Capaian dari tahun 2019 s.d 2023 mencapai nilai yang stabil sebesar 80% dari produk hukum yang dapat diakses publik. Capaian indikator persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh publik Tahun 2023 dengan target 110 (seratus sepuluh) dan realisasinya mencapai 212 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 192,73% dari target produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)						
			Penyampaian LKPJ dan RLPPD Pemerintah Prov. Sumsel yang tepat waktu		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD				
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec		3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang		60Pilar	60Pilar	60Pilar												
2			Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.		65 MoU	65 MoU				35 MoU					53%				
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	Jumlah Peraturan yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Perda		8 Perda	8 Perda		61,54%		80%	61,54%	
			Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Pergub		32 Pergub	8 Pergub		61,54%		120%	61,54%	
			Jumlah perkara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selesai		8 Perkara					8 Perkara		9 Perkara	8 Perkara		100%		78%	100%	
4	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi		Jumlah Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		100%					100%		100%	100%		100%		100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pembinaan koperasi dan UMKM, Pertanian dan Sumber Daya Alam serta TPID																
			Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kebijakan pembinaan LHK, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan jumlah BUMD yang dibina dan dievaluasi																
6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertangani	Jumlah dokumen informasi investasi daerah																
			kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah																
6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertangani			100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%	
7	Persentase Capaian Target Program Kegiatan APBD/APBN OPD Provinsi.	Jumlah realisasi Kegiatan APBD/APBN	100%		100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%	
8	Persentase Laporan yang dikelola	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Komponen Pelaporan	Jumlah Dokumen LKJIP Provinsi Sumatera Selatan		84		84	84											
		Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku			100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
9	Persentase PD yang telah menyusun anjab ABK	Jumlah PD yang telah membuat Anjab ABK			85%		85%	85%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Sumsel yang tertangani				100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	88,9%	-	-	-	-	98,0%	94,4%	-	-	-
2.	Persentase Kualitas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,3%	-	-	-	-	96,1%	99,6%	-	-	-
3.	Persentase Kepuasan Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94,1%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
4.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	82,4%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
5.	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja PD	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,6%	-	-	-	-	99,7%	91,2%	-	-	-
6.	Persentase Kepuasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kedinasan KDH/WKDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	75,3%	-	-	-	-	96,5%	87,7%	-	-	-
7.	Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas dan Fungsi KDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,6%	-	-	-	-	78,9%	83,3%	-	-	-
	Kepmen 050-5889 Tahun 2020 (Kegiatan)																		
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah																		
8	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,9%	92,2%	-	-	-	97,9%	96,1%	-
9	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	96,3%	88,6%	-	-	-	98,1%	94,3%	-
10	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	93,0%	99,0%	-	-	-	96,5%	99,5%	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	96,5%	97,5%	-	-	-	98,3%	98,8%	-
12	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,8%	97,5%	-	-	-	99,9%	98,8%	-
13	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	98,8%	94,4%	-	-	-	99,4%	97,2%	-
14	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,0%	99,6%	-	-	-	99,5%	99,8%	-
15	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,3%	96,2%	-	-	-	97,6%	98,1%	-
16	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	94,4%	99,5%	-	-	-	97,2%	99,7%	-
17	Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	98,9%	99,5%	-	-	-	99,4%	99,8%	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60%	65%													
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000 materai	8000 materai	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Peralatan dan Bahan Pembersih				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran				25 Orang Honorer	25 Orang Honorer	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri				25 Kali	25 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				80%	80%	-	-	-			-	-	-					
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Jenis	10 Jenis	-	-	-			-	-	-					
3	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur				80%	80%	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				109 Orang/ 2 stel	109 Orang/ 2 stel	-	-	-			-	-	-					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				100%	100%	-	-	-			-	-	-					

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				75%	75%	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75%	75%	-	-	-			-	-	-					
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				100%	100%	-	-	-			-	-	-					
	Dokumentasi dan Kliping				1000 Dokumen	1000 Dokumen	-	-	-			-	-	-					
	Penerbitan Informasi Pembangunan				5 Edisi	5 Edisi	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Informasi Layanan Masyarakat				3 Tema	3 Tema	-	-	-			-	-	-					
	Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik				101 media	101 media	-	-	-			-	-	-					
	Peliputan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dan Tamu Pimpinan				350 Kali	350 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Video Profil				1 Video	1 Video	-	-	-			-	-	-					
	Pengumpulan dan Penyaringan Informasi				3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	-	-	-			-	-	-					
	Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu SKPD				5 Jenis	5 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers				15 Kali	15 Kali	-	-	-			-	-	-					
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH				100%	100%	-	-	-			-	-	-					
	Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-Tamu Pimpinan				150 Kali	150 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				50 Kunker	50 Kunker	-	-	-			-	-	-					
	Pelaksanaan Silaturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan				30 Kali	30 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Rapat Koordinasi Bidang Keprotokolan se-Sumatera Selatan				85 Orang	85 Orang	-	-	-			-	-	-					
I	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti						100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-				-	-								

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				-	-				-	-								
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-				-	-								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-				-	-								
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																		
	Program	191.875.000	-	-	-	-	187.987.455	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	191.875.000	187.987.455
	Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah																	
	Program	1.229.040.400	-	-	-	-	1.216.267.780	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	1.229.040.400	1.216.267.780
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																	
	Program	827.897.000	-	-	-	-	817.003.140	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	827.897.000	817.003.140
	Penataan Daerah Otonom Baru																	
	Program	283.705.000	-	-	-	-	280.842.131	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	283.705.000	280.842.131
	Kerjasama Wilayah Perbatasan																	
	Program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi																	
	Kegiatan																	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																	
	Sub Kegiatan	-	-	156.840.000	134.340.000	161.760.000	-	-	156.840.000	134.340.000	155.640.000	0,00	0,00	1,00	1,00	0,96	452.940.000	446.820.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan	-	519.750.000	406.120.000	-	-	-	218.375.680	406.120.000	-	-	0,00	0,42	1,00	0,00	0,00	925.878.000	624.495.680
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	Sub Kegiatan	-	329.500.000	500.000.000	700.000.000	-	790.860.000	322.180.322	488.775.838	649.000.000	-	0,00	0,98	0,98	0,93	0,00	1.529.500.000	2.250.816.160
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	Sub Kegiatan	-	-	-	20.000.000	15.080.000	-	-	-	20.000.000	13.651.466	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	35.080.000	33.651.466
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	300.000.000	255.000.000	30.000.000	150.000.000	790.860.000	300.000.000	255.000.000	28.679.425	127.979.900	0,00	1,00	1,00	0,96	0,85	735.000.000	1.502.319.325	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	750.750.000	808.470.000	821.414.000	839.228.000	790.860.000	649.710.000	806.250.000	821.414.000	839.228.000	0,00	0,87	1,00	1,00	1,00	3.219.862.000	3.907.462.000	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah																		
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan																		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum		350.000.000	456.165.936	821.890.000	650.000.000	790.860.000	349.139.082	455.368.113	818.992.786	614.830.019	0,00	1,00	1,00	1,00	0,95	2.278.055.936	3.029.900.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah		825.000.000	1.022.000.000	800.000.000	600.000.000	790.860.000	776.162.028	987.027.517	777.034.328	597.173.426	0,00	0,94	0,97	0,97	1,00	3.247.000.000	3.928.357.299	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD		1.300.000.000	591.472.814	960.000.000	1.050.000.000	500.000.000	1.294.809.732	589.543.552	923.074.000	1.042.340.098	0,00	1,00	1,00	0,96	0,99	3.901.472.814	4.349.367.382	
	Sub Kegiatan Enhance dan Penyelenggaraan Pemerintahan		450.000.000	625.000.000	1.200.000.000	1.701.232.000	500.000.000	444.483.246	623.950.656	1.153.261.069	1.696.917.542	0,00	0,99	1,00	0,96	1,00	3.976.232.000	4.418.412.513	
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah																		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	-	139.957.169.162	84.421.968.463	250.000.000	18.361.414.423	590.000.000	139.946.703.006	67.149.574.420	248.524.700	18.267.657.908	0,00	1,00	0,80	0,99	0,99	242.990.552.048	226.202.460.034	
	JUMLAH	2.532.517.400	144.782.169.162	89.243.037.213	5.737.644.000	23.528.714.423	8.046.400.506	144.301.563.096	71.918.450.096	248.524.700	18.267.657.908	3,18	1,00	0,81	0,04	0,78	265.824.082.198	253.196.152.365	

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	985.600.000	-	-	-	-	813.322.560	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.652.262.500	-	-	-	-	1.171.054.241	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	1.808.274.000	1.396.055.000	1.582.620.000	1.729.000.000	-	1.524.935.800	1.280.339.200	1.480.672.962	1.558.831.925	-	84	92	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	96.360.000	124.080.000	124.480.000	-	-	96.360.000	122.400.000	97.690.000	-	-	100	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	348.000.000	112.000.000	183.920.000	519.690.000	-	172.675.800	109.654.200	178.152.962	518.212.925	-	50	98	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	578.760.000	754.260.000	919.620.000	1.051.830.000	-	578.760.000	640.890.000	825.320.000	910.109.000	-	100	85	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	128.014.000	22.125.000	-	-	-	70.000.000	22.125.000	-	-	-	55	100	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	753.500.000	411.310.000	355.000.000	33.000.000	-	703.500.000	411.310.000	354.800.000	32.820.000	-	93	100	-	-	-	-
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	2.191.726.000	2.428.945.000	2.707.380.000	1.591.364.000	-	1.980.594.115	2.284.522.291	2.623.419.005	1.569.897.772	-	90	94	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	-	1.026.000.000	1.050.000.000	1.055.000.000	641.214.805	-	980.864.796	958.285.673	1.047.023.485	624.456.442	-	96	91	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	1.165.726.000	1.378.945.000	1.652.380.000	950.149.195	-	999.729.319	1.326.236.618	1.576.395.520	945.441.330	-	86	96	-	-	-	-
	JUMLAH	2.637.862.500	4.000.000.000	3.825.000.000	4.290.000.000	3.320.364.000	1.984.376.801	3.505.529.915	3.564.861.491	4.104.091.967	3.128.729.697	75	88	93	-	-	-	-

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan																	
	Kegiatan Pelayanan Jema'ah Haji	18.426.200	-	-	-	-	18.426.200	-	-	-	-	100,00%	0%	0%	0%	0%	18.426.200	18.426.200
	Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz	101.945.000	-	-	-	-	87.196.600	-	-	-	-	85,53%	0%	0%	0%	0%	101.945.000	87.196.600
	Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Prov. Sumsel	888.275.000	-	-	-	-	428.138.625	-	-	-	-	48,20%	0%	0%	0%	0%	888.275.000	428.138.625
	Kegiatan Fasilitasi MTQ/STQ	1.224.745.000	-	-	-	-	1.071.258.523	-	-	-	-	87,47%	0%	0%	0%	0%	1.224.745.000	1.071.258.523
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Gubernur di Bidang Keagamaan	275.895.950	-	-	-	-	125.633.834	-	-	-	-	45,54%	0%	0%	0%	0%	275.895.950	125.633.834
	Kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD)	11.713.975.000	-	-	-	-	11.096.623.600	-	-	-	-	94,73%	0%	0%	0%	0%	11.713.975.000	11.096.623.600
	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga																	
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Tubuh	130.500.000	-	-	-	-	61.999.800	-	-	-	-	47,51%	0%	0%	0%	0%	130.500.000	61.999.800
	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keagamaan	311.002.300	-	-	-	-	185.632.300	-	-	-	-	59,69%	0%	0%	0%	0%	311.002.300	185.632.300
	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan																	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan	111.230.800	-	-	-	-	64.730.800	-	-	-	-	58,20%	0%	0%	0%	0%	111.230.800	64.730.800

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP UKS dan Tim Pembina Sekolah Sehat di Sumatera Selatan	132.429.700	-	-	-	-	125.353.470	-	-	-	-	94,66%	0%	0%	0%	0%	132.429.700	125.353.470
	Program Pemasang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100.000.000	110.000.000	100.000.000	110.000.000	-	26.647.219	40.268.379	98.165.719	18.448.000	0%	26,65%	36,61%	98,17%	16,77%	105.000.000	45.882.329
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	171.720.000	188.892.000	189.292.000	-	-	147.360.000	105.000.000	113.920.000	0%	0%	85,81%	55,59%	60,18%	109.980.800	122.093.333
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	42.125.000	72.616.000	22.000.000	87.865.360	-	-	-	22.000.000	37.588.000	0%	0,00%	0,00%	100,00%	42,78%	56.151.590	29.794.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	97.420.000	0%	0%	0%	0%	97,42%	100.000.000	97.420.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	59.803.580	-	0%	0%	0%	99,67%	0%	60.000.000	59.803.580
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	38.680.400	42.548.440	-	-	-	31.712.000	41.850.000	0%	0%	0%	81,98%	98,36%	40.614.420	36.781.000

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	561.845.000	609.060.000	760.000.000	636.400.000	-	393.278.992	412.433.783	539.038.836	380.032.044		70,00%	67,72%	70,93%	59,72%	641.826.250	431.195.914
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	698.500.000	868.350.000	-	70.000.000	-	584.850.000	838.500.000	-	64.830.000	0%	83,73%	96,56%	0%	92,61%	545.616.667	496.060.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	167.850.000	259.789.786	250.000.000	275.000.000	-	167.608.000	233.192.000	246.340.000	274.400.000	0%	99,86%	89,76%	98,54%	99,78%	238.159.947	230.385.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	682.890.000	682.890.000	716.820.000	716.820.000	-	618.000.000	619.260.000	602.760.000	439.868.000	0%	90,50%	90,68%	84,09%	61,36%	699.855.000	569.972.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	66.000.000	-	-	-	-	45.400.400	0%	0%	0%	0%	68,79%	66.000.000	45.400.400
	Program Kesejahteraan Rakyat																	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual																	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	-	18.025.062.300	19.025.548.030	6.550.000.000	17.405.000.000	-	3.200.000.000	17.046.411.473	6.468.030.400	17.206.729.483	0%	17,75%	89,60%	98,75%	98,86%	15.251.402.583	10.980.292.839

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	-	17.672.024.000	21.296.468.825	15.574.058.400	18.956.934.200	-	13.974.578.377	16.857.391.449	14.271.504.126	17.505.670.640	0%	79,08%	79,16%	91,64%	92,34%	18.374.871.356	15.652.286.148
	Kegiatan Fasilitasi Pengembang an Kesejahtera an Rakyat Pelayanan Dasar																	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koord inasi, Sinkronis asi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-	-	-	70.000.000	77.000.000	-	-	-	57.980.150	70.471.348	0%	0%	0%	82,83%	91,52%	73.500.000	64.225.749
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koord inasi, Sinkronis asi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	-	387.450.000	237.179.914	150.000.000	165.000.000	-	142.561.422	197.291.737	115.741.390	161.188.437	0%	36,79%	83,18%	77,16%	97,69%	234.907.479	154.195.747
	Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-	397.737.700	287.511.470	150.000.000	195.000.000	-	166.533.399	184.244.637	125.192.345	166.610.759	0%	41,87%	64,08%	83,46%	85,44%	257.562.293	160.645.285
	Kegiatan Fasilitasi Pengembang an Kesejahtera an Rakyat Non Pelayanan Dasar																	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	261.000.000	287.100.000	250.000.000	275.000.000	-	102.824.800	287.021.400	223.961.500	247.973.580	0%	39,40%	99,97%	89,58%	90,17%	268.275.000	215.445.320

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	-	70.000.000	77.000.000	-	-	-	35.595.000	71.391.730	0%	0%	0%	50,85%	92,72%	73.500.000	53.493.365
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	-	-	-	70.000.000	107.000.000	-	-	-	39.390.996	100.920.234	0%	0%	0%	56,27%	94,32%	88.500.000	70.155.615
	JUMLAH	14.908.424.950	38.996.484.000	43.908.234.025	25.020.450.800	39.551.860.000	13.264.993.752	19.376.882.209	36.863.374.858	23.042.216.042	37.044.712.655	88,98%	49,69%	83,96%	92,09%	93,66%	52.194.148.333	42.780.521.376

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IV. BIRO PEREKONOMIAN																		
	Program Pembangunan Bidang Ekonomi	244.643.900	-	-	-	-	242.101.482	-	-	-	-	98,96%	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	550.487.410	-	-	-	-	537.942.895		-	-	-	97,72%		-	-	-	-	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	948.900.000	1.100.000.000	1.550.000.000	863.424.000		848.360.982	1.009.852.598	1.416.584.980	769.105.620		89,40%	91,80%	91,39%	89,08%	#DIV/0!	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	404.694.400	660.410.000	1.155.000.000	546.553.500		277.589.884	568.334.734	1.059.918.970	514.841.314		68,59%	86,06%	91,77%	94,20%	#DIV/0!	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	1.185.305.600	1.291.200.000	1.094.500.000	878.485.000	-	844.720.216	1.121.045.742	951.966.363	748.601.804	-	71,27%	86,82%	86,98%	85,22%	#VALUE!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	291.686.300	-				291.686.300					100,00%						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.000.000	-				35.000.000					100,00%						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113.860.000	-				113.860.000					100,00%						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	26.600.000	-				26.600.000					100,00%						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	147.000.000	161.700.000	166.142.500	-	-	147.000.000	161.700.000	115.050.000	-	-		-	69,25%	#VALUE!	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	427.650.000	370.000.000	406.910.000	400.547.500		427.650.000	370.000.000	406.910.000	393.565.799		100,00%	100,00%	100,00%	98,26%	#DIV/0!	

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	1.791.650.000	150.000.000	165.000.000	150.092.150	-	1.791.650.000	150.000.000	165.000.000	147.550.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	98,31%	#VALUE!	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	241.800.000	241.800.000	241.890.000	375.661.000	-	241.800.000	241.800.000	241.890.000	225.240.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	59,96%	#VALUE!	
	JUMLAH	1.262.277.610	5.000.000.000	3.960.410.000	4.775.000.000	3.380.905.650	1.247.190.677	4.431.771.082	3.608.033.074	4.403.970.313	2.913.954.537	98,80%	88,64%	91,10%	92,23%	86,19%	0,00%	
V.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	394.555.000	-	-	-	-	354.555.000	-	-	-	-	90	-	-	-	-	131.518.333	118.185.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.800.000	-	-	-	-	102.800.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	34.266.667	34.266.667
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	93.492.000	-	-	-	-	45.562.000	-	-	-	-	49	-	-	-	-	31.164.000	15.187.333
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.600.000	-	-	-	-	11.438.000	-	-	-	-	43	-	-	-	-	8.866.667	3.812.667
	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	592.844.427	-	-	-	-	542.536.000	-	-	-	-	92	-	-	-	-	197.614.809	180.845.333
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.675.000.000	998.361.750	1.416.490.000	1.016.924.000	-	1.516.205.000	-	1.053.983.651	823.404.926	-	-	-	74	81	891.120.583	505.401.667

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100.000.000	25.000.000	-	-	-	-	17.559.300	-	-	-	-	70	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	110.760.000	110.760.000	111.160.000	-	-	110.760.000	103.560.000	111.160.000	-	-	100	93	100	36.920.000	36.920.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	117.585.000	146.871.750	300.000.000	88.500.000	-	30.000.000	35.301.000	42.425.000	81.186.000	-	26	24	14	92	88.152.250	21.767.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	340.000.000	390.000.000	500.000.000	429.600.000	-	290.000.000	275.868.435	392.769.651	335.406.626	-	85	71	79	78	243.333.333	188.622.812
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	941.685.000	350.730.000	130.000.000	85.900.000	-	941.685.000	329.190.000	239.400.000	85.520.000	-	100	94	184	100	430.805.000	423.625.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	275.730.000	-	275.730.000	276.764.000	-	254.520.000	-	275.829.000	192.573.000	-	-	-	100	70	91.910.000	84.840.000
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	925.000.000	950.000.000	750.000.000	750.000.000	-	801.640.777	635.275.179	631.916.768	576.075.167	-	-	67	84	77	625.000.000	478.971.985
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	650.000.000	575.000.000	450.000.000	420.000.000	-	532.152.180	-	341.275.437	330.066.933	-	82	-	76	79	408.333.333	177.384.060
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	275.000.000	375.000.000	300.000.000	330.000.000	-	269.488.597	-	290.641.331	246.008.234	-	98	-	97	75	216.666.667	89.829.532
	Jumlah	1.210.291.427	2.600.000.000	1.948.361.750	2.166.490.000	1.766.924.000	1.056.891.000	2.317.845.777	1.386.394.614	1.685.900.419	1.399.480.093	87	89	71	78	79		

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VI. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	n/a					n/a					n/a						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a					n/a					n/a						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	288.835.922					263.473.722					0,91						
	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	3.428.825.890					3.374.472.152					0,98						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		1.299.425.000	3.159.925.000	1.470.000.000	1.529.400.000		1.081.033.304	2.647.972.903	1.072.298.109	882.614.213		0,8319	0,84	0,73	0,58		
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		4.400.575.000	6.443.000.000	6.570.000.000	4.265.000.000		4.346.754.968	5.849.993.261	6.035.468.913	3.990.638.465		0,9878	0,91	0,92	0,94		
	Jumlah	3.717.661.812	5.700.000.000	9.602.925.000	8.040.000.000	5.794.400.000	3.637.945.874	5.427.788.272	8.497.966.164	7.107.767.022	4.873.252.678							
VII. BIRO ORGANISASI																		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000	-	-	-	-	94.222.946	-	-	-	-	62,82%	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-		
	Program Penataan Peraturan per Undang-Undangan.	395.000.000	300.000.000	-	-	-	354.628.082	268.638.080	-	-	-	89,78%	89,55%	-	-	-		

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur /PNS/ Anggota KORPRI	3.302.908.000	1.128.200.000	-	-	-	2.313.473.475	822.992.955	-	-	-	70,04%	72,95%	-	-	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	124.736.500	-	-	-	-	108.381.000	-	-	-	-	86,89%	-	-	-		
	Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi	-	425.000.000	-	-	-	-	302.520.436	-	-	-	-	71,18%	-	-	-		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	140.000.000	-	-	-	-	138.029.992	-	-	-	-	98,59%	-	-		
	Program Penataan Organisasi																	
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	378.000.000	258.000.000	310.000.000	-	-	355.160.693	252.197.658	-	-	-	93,96%	97,75%	-		
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	465.690.000	491.860.000	581.860.000	-	-	455.211.582	475.273.010	-	-	-	97,75%	96,63%	-		
	Jumlah	3.867.908.000	1.997.936.500	983.690.000	749.860.000	891.860.000	2.782.324.503	1.522.532.471	948.402.267	727.470.668	0	3	4	3	2	0	0	0

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VIII. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN																		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.867.908.000	1.997.936.500	983.690.000	749.860.000	891.860.000	2.782.324.503	1.522.532.471	948.402.267	727.470.668	-	71,93%	76,21%	96,41%	97,01%	-		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94.684.915.940	-	-	-	-	93.276.625.940	-	-	-	-	93.980.770.940	-	-	-	-	46.638.312.970	46.990.385.470
	Peningkatan Disiplin Aparatur	3.159.000.000	-	-	-	-	2.788.812.000	-	-	-	-	2.973.906.000	-	-	-	-	1.394.406.000	1.486.953.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272.762.000	-	-	-	-	176.600.000	-	-	-	-	224.681.000	-	-	-	-	88.300.000	112.340.500
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	346.600.000	-	-	-	-	302.309.455	-	-	-	-	324.454.728	-	-	-	-	151.154.728	162.227.364
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	6.753.000.000	-	-	-	-	3.419.804.800	-	-	-	-	5.086.402.400	-	-	-	-	1.709.902.400	2.543.201.200
	Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas dan Fungsi KDH	1.358.250.000	-	-	-	-	450.762.226	-	-	-	-	904.506.113	-	-	-	-	225.381.113	452.253.057
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI											-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	300.000.000	330.000.000	350.000.000	385.800.000	-	287.566.100	304.125.740	285.665.215	285.665.215	-	293.783.050	317.062.870	317.832.608	335.732.608	341.450.000	316.102.784
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	57.653.235.650	64.894.333.650	71.154.503.000	71.239.503.000	-	55.498.700.516	57.461.938.292	60.185.526.342	63.133.376.281	-	56.575.968.083	61.178.135.971	65.670.014.671	67.186.439.641	66.235.393.825	62.652.639.591

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.685.000.000	1.690.000.000	1.730.000.000	1.880.000.000	-	1.566.700.012	1.673.727.790	1.546.214.003	1.755.033.169	-	1.625.850.006	1.681.863.895	1.638.107.002	1.817.516.585	1.746.250.000	1.690.834.372
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3.604.550.000	2.235.900.000	585.900.000	2.275.900.000	-	3.478.910.015	2.181.005.156	27.910.000	1.129.150.000	-	3.541.730.008	2.208.452.578	306.905.000	1.702.525.000	2.175.562.500	1.939.903.146
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	21.635.242.000	31.568.742.000	41.507.750.000	45.485.000.000	-	21.591.520.000	30.779.598.647	37.720.555.790	24.105.480.782	-	21.613.381.000	31.174.170.324	39.614.152.895	34.795.240.391	35.049.183.500	31.799.236.152
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	34.427.750.000	27.857.750.000	27.100.000.000	26.353.525.000	-	34.001.700.456	26.290.776.517	26.824.243.850	18.877.472.500	-	34.214.725.228	27.074.263.259	26.962.121.925	22.615.498.750	28.934.756.250	27.716.652.290
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	42.251.861.350	54.833.378.350	52.140.000.000	51.458.274.103	-	41.821.290.000	54.600.378.350	54.888.472.648	36.453.149.470	-	42.036.575.675	54.716.878.350	53.514.236.324	43.955.711.787	50.170.878.451	48.555.850.534
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	64.774.305.252	62.294.133.000	39.534.613.000	61.338.074.300	-	61.694.358.772	59.945.043.391	39.864.268.608	44.448.140.169	-	63.234.332.012	61.119.588.196	39.699.440.804	52.893.107.235	56.985.281.388	54.236.617.062
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	8.989.662.000	9.463.959.000	7.565.243.000	9.058.904.000	-	8.485.912.805	9.412.797.884	10.164.510.598	9.109.823.100	-	8.737.787.403	9.438.378.442	8.864.876.799	9.084.363.550	8.769.442.000	9.031.351.548
	Facilitasi Kerumahtang aan Sekretariat Daerah	-	14.450.000.000	11.450.000.000	11.450.000.000	16.995.000.000	-	14.286.470.400	11.393.912.987	8.787.605.755	11.060.345.322	-	14.368.235.200	11.421.956.494	10.118.802.878	14.027.672.661	13.586.250.000	12.484.166.808
	JUMLAH	110.442.435.940	251.769.542.752	267.601.886.000	253.867.869.000	287.361.840.403	103.197.238.924	244.235.661.547	254.991.707.021	241.022.443.477	210.357.636.008	103.494.721.181	246.242.367.665	260.330.750.378	246.706.490.905	248.413.808.206	314.201.905.124	302.170.714.878

No.	Uraian Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IX. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.331.010.000	-	-	-	-	3.344.032.000	-	-	-	-						3.331.010.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.000.000	-	-	-	-	696.877.000	-	-	-	-						700.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	456.250.000	-	-	-	-	456.250.000	-	-	-	-						456.250.000	
	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan	26.600.000					26.600.000											
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	133.400.000					93.400.000											
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	31.495.382.197	-	-	-	-	31.179.921.830	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	31.495.382.197	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	6.591.857.755	-	-	-	-	3.856.051.642	-	-	-	-	58%	-	-	-	-	6.591.857.755	
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti																	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100.000.000	50.000.000	25.000.000	-	-	0	29.904.286	11.248.000	-	-	-	60%	45%	75.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	217.320.000	250.647.000	251.047.000	-	-	217.320.000	225.720.000	218.920.000	-	-	-	90%	87%	233.983.500	
	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-	636.082.070	610.947.070	443.400.000	190.000.000	-	460.689.400	532.940.000	341.500.000	184.600.000	-	-	87%	77%	97%	414.782.357	

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Permendagri NO 13 Tahun 2016 (Program)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.775.000.000	2.230.000.000	2.250.000.000	2.193.000.000	-	1.754.414.353	2.212.623.500	2.202.420.634	2.156.062.442	-	-	99%	98%	98%	2.224.333.333	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	450.000.000	300.000.000	700.000.000	300.000.000	-	449.139.040	297.512.000	670.695.000	299.600.000	-	-	99%	96%	100%	433.333.333	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.280.850.000	1.577.000.000	1.577.000.000	1.189.000.000	-	1.121.400.000	1.332.230.000	1.446.896.000	1.071.056.000	-	-	84%	92%	90%	1.447.666.667	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	-	50.000.000	46.102.500	50.000.000	74.183.000	-	-	92%	100%	74%	66.666.667	
	Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	33.510.901.830	30.245.330.975	33.477.011.000	30.775.953.000	-	32.613.906.121	29.840.912.314	29.934.347.172	30.555.693.897	-	-	99%	89%	99%	31.499.431.658	
	Fasilitasi Keprotokolan	-	6.939.483.000	11.150.000.000	10.200.000.000	8.425.000.000	-	5.303.554.010	9.329.845.551	9.320.089.148	7.994.279.107	-	-	84%	91%	95%	9.925.000.000	
	JUMLAH	42.734.499.952	44.642.316.900	46.480.598.045	48.998.058.000	43.449.000.000	39.653.132.472	41.753.102.924	43.809.485.865	44.221.572.240	42.565.642.446	2	-	6	8	8	88.894.697.467	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

I. Biro Pemerintahan

- Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- DPRD Kabupaten/Kota

II. Biro Hukum dan Hak Asasi manusia

- Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- Pejabat Pemerintah
- Masyarakat yang bermasalah hukum
- Organisasi Bantuan Hukum
- Lembaga / Instansi Pemerintah
- Akademisi

III. Biro Kesejahteraan Rakyat

- Masyarakat Umum
- Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial
- Organisasi Kemasyarakatan
- BUMN / BUMD
- Satuan Kerja Pemerintah Daerah
- Daerah Otonomi Baru

IV. Biro Perekonomian

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas/Badan OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Perdagangan Prov. Sumsel, Kesbangpol, BPKAD, Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel, Dinas Perindustrian Prov. Sumsel, Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, Dinas ESDM Prov. Sumsel, Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel, Dinas Sosial Prov. Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel.

V. Biro Administrasi Pembangunan

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelompok internal yaitu Bagian-Bagian Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan eksternal yaitu Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

VI. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki sasaran meliputi unit kerja pemerintah (perangkat daerah, sekolah dan desa), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam proses PBJ, serta pelaku usaha yang merupakan penyedia barang dan jasa.

VII. Biro Organisasi

Kelompok sasaran utama pelayanan Biro Organisasi pada umumnya adalah :

1. Perangkat Daerah/Organisasi Internal Pemerintah Daerah.

ini adalah sasaran inti karena tugas utama Biro Organisasi berfokus pada :

- **Penataan Kelembagaan**, membantu/memfasilitasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Biro lain) dalam pembentukan, penataan dan evaluasi struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien.
- **Ketatalaksanaan**, membina dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peta Proses Bisnis dan Tatalaksana Pemerintahan yang baik.
- **Analisis Jabatan dan Beban Kerja**, membantu/memfasilitasi Perangkat Daerah menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta Standar Kompetensi Jabatan.
- **Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta peningkatan Budaya Kerja.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Biro Organisasi memiliki peran dalam :

- Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan, memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Penataan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
- **Fasilitasi Reformasi Birokrasi**, mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan menjadi sasaran dalam aspek :

- **Pembinaan Budaya Kerja**, peningkatan etos kerja dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- **Administrasi Kepegawaian**, menangani fasilitasi dibidang kepegawaian internal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- **Pelayanan Publik (secara tidak langsung)**, Biro Organisasi bertugas memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh seluruh Perangkat Daerah. Meskipun pelayanan publik ditujukan kepada masyarakat, Biro Organisasi berperan dalam memastikan bahwa penyelenggara layanan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah memilih system dan prosedur yang optimal.

VIII. Biro Umum dan Perlengkapan

- Biro dilingkup Setda Prov. Sumsel
- PD dilingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Organisasi kepemudaan
- Organisasi keagamaan
- Pemerintah kabupaten kota se Sumatera Selatan

- Perbankan
- Lembaga sosial kemasyarakatan
- Lembaga keuangan vertical
- Forum komunikasi perangkat daerah se-Sumatera Selatan
- BUMN / BUMD

IX. Biro Humas dan Protokol

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Humas dan Protokol, Biro Humas dan Protokol memiliki kelompok sasaran meliputi unit kerja pemerintah, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintah sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan

Sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, Setda melalui 9 Biro yang ada dalam strukturnya membangun jejaring kemitraan yang luas, baik dengan internal perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, maupun mitra non-pemerintah.

Berikut tabel mitra pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

No	Staf Ahli	Biro	Dinas/Badan/ Instansi Vertikal	Bentuk layanan/fasilitasi
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov. Sumsel	- Dinas PMD - Badan Kesbangpol - Bagian Pemerintahan Kab/Kota - Bappeda	- Koordinasi pemerintahan umum - Pembinaan otonomi daerah - Sinkronisasi penataan wilayah
		Biro Hukum dan HAM	- Seluruh OPD pengusul produk hukum - Bagian Hukum Kab/Kota - Kanwil Kemenhum - Bappeda	- Fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum - Bantuan hukum - Sinkronisasi regulasi dengan kebijakan pembangunan
		Biro Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial - Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan & Pariwisata - Kanwil Kemenag - Organisasi Sosial/Keagamaan	- Fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial, budaya, kepemudaan - Dukungan koordinasi program layanan dasar publik
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Biro Perekonomian	- Dinas Perindag, Pertanian, Perkebunan - Dinas ESDM, Dinas Perhubungan - Bank Indonesia, OJK, BUMD	- Koordinasi stabilitas ekonomi - Fasilitasi TPID - Pengendalian harga dan distribusi logistik
		Biro Administrasi Pembangunan	- Bappeda - Dinas teknis pelaksana kegiatan fisik - Inspektorat - Dinas PU/BM, Cipta Karya	- Monitoring dan evaluasi pembangunan - Sinkronisasi perencanaan-pelaksanaan - Pelaporan capaian pembangunan
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	- Seluruh OPD pengguna anggaran - UKPBJ Kab/Kota - Inspektorat - BPKAD	- Pendampingan dan pembinaan pengadaan - Pengawasan proses pengadaan - Sinkronisasi anggaran pengadaan
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakata	Biro Organisasi	- Seluruh OPD - BKD - Bappeda - KemenPAN-RB,	- Pembinaan kelembagaan - Penyusunan struktur organisasi, ANJAB,

	n dan SDM		BKN	ABK - Penguatan kapasitas organisasi
		Biro Umum dan Perlengkapan	- Seluruh OPD pengguna layanan perkantoran - BPKAD - BKD	- Penyediaan fasilitas, logistik, perlengkapan - Pengelolaan aset/barang - Layanan umum perkantoran dan dukungan kepegawaian
		Biro Humas dan Protokol	- Dinas Kominfo - Seluruh OPD penyelenggara kegiatan pimpinan - Media massa dan lembaga penyiaran - DPRD	- Layanan keprotokolan - Publikasi dan komunikasi publik - Dukungan hubungan media dan penyebaran informasi kebijakan pemerintah

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Setda Sumsel) memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dukungan BUMD terhadap kinerja Setda Sumsel tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, partisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peran dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah, hingga memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan.

Aspek Dukungan	Bentuk Peran BUMD	Biro Terkait
Dukungan	- Penyediaan logistik kegiatan resmi	Biro Umum dan

program/kegiatan	- Penyedia jasa transportasi dan akomodasi - Dukungan sponsor pada acara sosial, budaya, keagamaan	Perlengkapan, Biro Kesra
Peningkatan pelayanan publik	- Inovasi layanan digital pembayaran/perizinan - Layanan publik dasar (air bersih, transportasi, energi, keuangan) berbasis teknologi	Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan
Penguatan ekonomi daerah	- Mendorong investasi dan memperkuat rantai pasok lokal - Diversifikasi usaha sektor strategis	Biro Perekonomian
Kontribusi PAD	- Memberikan dividen dan bagi hasil kepada daerah - Menjadi sumber penerimaan pajak/retribusi	Biro Perekonomian, Biro Umum dan Perlengkapan

Kontribusi BUMD melalui dukungan program, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan struktur ekonomi daerah, dan juga terhadap PAD menjadi salah satu bentuk sinergi yang nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda. Sinergi ini semakin diperkuat melalui forum koordinasi, penyelarasan rencana bisnis, dan pertukaran informasi strategis yang dikelola secara terintegrasi dengan arah kebijakan RPJMD dan sasaran Renstra Setda Sumsel.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Setda

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama daerah. Kerja sama ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah, memperluas jaringan kemitraan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra. Tanggung jawab ini umumnya dikoordinasikan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, namun pelaksanaannya bersifat lintas biro tergantung pada substansi kerja sama. Untuk lebih rincinya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Jenis kerja sama	Peran Setda	Biro Penanggung Jawab	Mitra Utama
Kerja sama antar daerah (KSD)	Memfasilitasi penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU), koordinasi antar kepala daerah, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	Pemprov lain, Pemkab/Pemkot dalam/luar Sumsel
Kerja sama dengan pemerintah pusat	Mengoordinasikan persetujuan, harmonisasi substansi kerja sama, dan pengawalan implementasinya di tingkat daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (koordinator umum); Biro Administrasi Pembangunan (teknis)	Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
Kerja sama dengan Badan	Memfasilitasi proses negosiasi,	Biro Perekonomian	BUMN, BUMD, Perusahaan

Usaha (BUMN/BUMD / Swasta	telaah hukum, koordinasi dengan perangkat daerah teknis, dan persetujuan dari kepala daerah	, Biro Pengadaan Barang/Jasa	swasta nasional/daerah
Kerja sama dengan lembaga non- pemerintah	Melakukan koordinasi lintas biro (misalnya Biro Kesra, Biro Organisasi) untuk mendukung proses administrasi dan pembiayaan kegiatan kerja sama	Biro Kesra, Biro Organisasi	Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan

Melalui pengelolaan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi, Setda Sumsel mampu memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalankan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sinergi antar pihak yang terbangun melalui kerja sama ini juga memperkuat daya dukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Permasalahan dan Isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi saat ini

dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan dinamika global, arah pembangunan nasional, serta isu-isu strategis regional Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Masih belum optimalnya kinerja Aparatur Pelaksana Kerja Sama dalam hal perencanaan dan eksekusi pelaksanaan kerja sama daerah
- 3) Masih terdapat potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan; kesenjangan pembangunan antarwilayah; pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai lokal
- 4) Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama; perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh; keterbatasan dukungan fasilitas pembinaan sosial. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (ASN), masih terdapat penempatan ASN yang belum sesuai dengan Kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja
- 5) Optimalisasi Penataan Perekonomian daerah masih belum tercapai secara maksimal akibat keterbatasan Sumber Daya

- Manusia yang memiliki Keahlian Sebagai Analis Ekonomi dan Masih Terkendalanya Keterlambatan Pengiriman data-ata yang dibutuhkan dari instansi terkait lainnya dalam penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan
- 6) Minimnya Kapasitas Regulasi dan Pengawasan Aktifitas Perekonomian dalam rangka mendorong adposisi ekonomi berkelanjutan
 - 7) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Akibat Kurangnya Pemahaman Para Pelaku Pengadaan
 - 8) Belum Tersedianya alat ukur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan peluang perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses Pengadaan Barang Jasa yang adil, Transparan dan Akuntabel
 - 9) Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 - 10) Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengembangan data/Informasi Pembangunan
 - 11) Belum optimalnya pelayanan dalam fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 12) Belum Optimalnya Capaian Reformasi Birokrasi
 - 13) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perlu karena kurangnya Ketaatan Terhadap Standar Operasional Prosedur dan Budaya Kerja yang telah di tetapkan
 - 14) Belum Optimal nya Upaya Reformasi Hukum, Belum memadainya SDM di bidang regulasi dan belum optimalnya partisipasi pembentukan regulasi
 - 15) Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum sesuai
 - 16) Belum Optimalnya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Serta Pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi, serta belum optimalnya

- peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan
- 17) Penempatan ASN yang masih belum sesuai dengan Kompetensi dan Kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, permasalahan sekretariat daerah merupakan refleksi nyata dari tantangan global (digitalisasi, good governance, ekonomi berkelanjutan), tantangan nasional (reformasi birokrasi, integrasi data, pemerataan pembangunan), dan tantangan regional (kearifan lokal dan penguatan kelembagaan daerah) sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini memperkuat posisi Sekretariat Daerah sebagai garda depan tata kelola pemerintahan daerah yang harus segera melakukan transformasi birokrasi, penguatan SDM, digitalisasi pelayanan, dan integrasi perencanaan untuk mendukung pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional. Kelemahan birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan sosial dan ekonomi yang muncul di daerah, seluruhnya beririsan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.

Sebagai bagian dari wilayah strategis Sumatera Selatan, menghadapi tantangan regional, diantaranya :

- Potensi konflik horizontal: Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengaruh budaya luar, serta lemahnya regenerasi tokoh adat/agama menjadi

faktor risiko yang perlu dimitigasi.

- Kelembagaan adat dan kearifan lokal: Sumatera Selatan memiliki basis sosial-budaya yang kuat, namun perlu diperkuat perannya dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik sosial.
- Kapasitas tata kelola pemerintahan daerah: Masih terdapat kendala koordinasi lintas kabupaten/kota, pelaporan pembangunan yang belum optimal, serta keterbatasan dalam pengembangan data pembangunan.

Di samping itu juga, isu strategis Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

- 1) Belum optimalnya koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan pemerintahan umum, serta rendahnya capaian Reformasi Birokrasi.
- 2) Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi, keterbatasan keterampilan, serta lemahnya manajemen SDM Aparatur
- 3) Masih adanya potensi konflik sosial, lemahnya regenerasi tokoh adat/agama, dan keterbatasan fasilitas pembinaan sosial.
- 4) Belum optimalnya pelaporan dan pengendalian pembangunan, keterlambatan pengiriman data, serta lemahnya sistem informasi pembangunan.
- 5) Keterbatasan kapasitas analisis ekonomi daerah, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, serta belum optimalnya kerja sama daerah.
- 6) Sistem pengadaan barang/jasa belum optimal, minim pemahaman pelaku, serta belum adanya alat ukur kualitas dan akuntabilitas pengadaan.
- 7) Kurangnya efektivitas dukungan administrasi dan layanan pimpinan daerah, termasuk pemeliharaan sarpras, dokumentasi, dan penyampaian informasi kegiatan

pimpinan.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan yang harus segera diatasi agar Sekretariat Daerah mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Semua Isu strategis di atas memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah :

- **Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka Ekonomi kerakyatan yang Berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat** → relevan dengan isu kapasitas ekonomi daerah, kerja sama regional, dan penguatan regulasi ekonomi berkelanjutan.
- **Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas** → relevan dengan mayoritas permasalahan Setda, termasuk reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, optimalisasi pengadaan, serta pengembangan data pembangunan
- **Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal** → relevan dengan pengembangan toleransi kehidupan beragama.

Dengan demikian, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian **VISI RPJMD 2025–2029: “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”** khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.3

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi konsultasi, Fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan	Perencanaan pembangunan ramah lingkungan & partisipasi	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDG 16 Peace Justice and Strong Institutions)	Reformasi birokrasi peningkatan kapasitas, tata kelola pemerintahan yang efektif	Sinergi antarwilyah, koordinasi pembangunan regional konsisten kebijakan antarprovinsi	Peningkatan efektivitas koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan RANHAM di Daerah, yaitu Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM)	Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM) Aksesibilitas atau sarana dan prasarana yang layak bagi Penyandang Disabilitas	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	RPJMN dan SDGs terkait HAM dan Pembangunan berkeadilan	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	Penguatan koordinasi dan Implementasi RANHAM lintas sektor di tingkat Provinsi
Biro Kesejahteraan Rakyat	Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama, perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh, keterbatasan dukungan fasilitas pembinaan sosial	Penguatan peran kelembagaan lokal, pelestarian nilai sosial budaya, peningkatan kualitas SDM berbasis kearifan lokal	Pengaruh ideologi transnasional, perubahan nilai akibat globalisasi menjadi isu intoleransi	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pembinaan karakter serta pemajuan kebudayaan	Perubahan struktur sosial di pedesaan akibat masuknya pendatang dengan budaya yang berbeda	Memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga perdamaian
	Masih terdapat	Pelestarian adat budaya lokal,	Arus globalisasi	Pengentasan	Perbedaan budaya	Memperkuat kerukunan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan , kesenjangan pembangunan antar wilayah, pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai lokal	peningkatan kualitas kerukunan dan toleransi pembangunan dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	dan modernisasi budaya serta pengaruh media digital terhadap nilai sosial menjadi isu toleransi	kemiskinan dan pemerataan pembangunan serta pemajuan kebudayaan	yang memerlukan adaptasi sosial dan pemerataan pembangunan antar wilayah	antar umat beragama dan melestarikan kearifan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya
Biro Perekonomian	Belum optimalnya pengelolaan kebijakan perekonomian daerah yang sinergi antara hulu dan hilir	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, Inflasi, PDRB Perkapita, Investasi, Kemiskinan dan Pengangguran).	Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity	Pertumbuhan Nasional	Sumsel Berintegritas dan melayani	-
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian dalam merespon dinamika lingkungan strategis perekonomian global/ nasional/ regional/ lokal yang sangat VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity)	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan perekonomian yang mendasarkan sinergi data empiris yang handal (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan Perhubungan).	-	-	-	-
	Kurang efektifnya BUMD dalam implementasi kebijakan daerah yang	Belum terdapat roadmap yang secara konsisten terkait penambahan penyertaan modal disetor kepada BUMD tiap	-	Pertumbuhan ekonomi	100.000 Sultan Muda Sumsel	-

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	mendukung pengembangan ekonomi daerah.	tahunnya supaya tidak terjadi dilusi dan untuk pengembangan usaha.				
Biro Administrasi Pembangunan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Global	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Nasional	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Regional	Optimalisasi koordinasi antar OPD, peningkatan kualitas dan efektivitas pelaporan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mewujudkan ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan pada Pemprov Sumsel	Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memperbaiki sistem perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Sustainable Public Procurement	Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri	Menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan kondusif.
Biro Organisasi	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Integrasi isu pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan kebijakan dengan memastikan organisasi dan tatalaksana birokrasi memungkinkan koordinasi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan	Tatakelola perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs)	Reformasi Birokrasi (efisiensi sumber daya dan "green office") dan tatakelola digital	Koordinasi lintas batas dan penataan kelembagaan	Tatalaksana Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		berkelanjutan.				
	Meningkatkan jasa kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang mencakup Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan merancang sistem akuntabilitas kinerja yang tidak hanya fokus pada target administratif, tetapi juga memasukkan indikator-indikator yang berkelanjutan.				
		Pemanfaatan teknologi dan tatalaksana digital dengan mendorong implementasi tatalaksana digital yang efisien.				
Biro Umum dan Perlengkapan	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum selesai	Belum ada integrasi prinsip green building efisiensi energi dan ramah lingkungan dalam pengelolaan kantor	Kompetensi ASN perlu disesuaikan dengan perkembangan global	Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2025 dan RB tematik 2025-2029 menekankan efisiensi sarana prasarana dan kompetensi ASN serta UU ASN & manajemen Talenta Nasional menurut penempatan Asn berbasis kompetensi	Kesenjangan sarana dan prasarana antar wilayah memperlebar disparitas pelayanan publik serta SDM Aparatur belum merata kualitasnya sehingga mempengaruhi pelayanan Administrasi dan	Optimalisasi pemeliharaan kantor agar layak layanan administrasi tidak terganggu dan biaya jangka panjang efisiensi dan peningkatan kualitas SDm Aparatur melalui manajemen talenta. Pelatihan kompetensi digital dan green governance serta optimalisasi setda

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
					koordinasi pembangunan lintas wilayah	sebagai koordinator dalam penyediaan sarana prasarana & pengelolaan ASN lintas Biro
Biro Humas dan Protokol	Belum Optimalnya peliputan dan dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Hubungan Media: Membangun Hubungan dengan Media untuk Meningkatkan Citra Pemerintah daerah dan menyebarluaskan informasi pembangunan daerah	Penguatan Sistem Dokumentasi dan kehumasan digital

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Setda

3.1.1 Tujuan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang, yang mencakup misi Sekretariat Daerah yaitu mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas, serta mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Sekretariat Daerah memiliki beberapa tujuan yang merupakan turunan dari sasaran RPJMD sesuai dengan misi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- d. Menguatnya Ketentraman di Masyarakat

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya stabilitas ekonomi makro daerah. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah, penyediaan data dan analisis ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, serta fasilitasi iklim investasi yang kondusif melalui kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh biro di dalamnya mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, serta akuntabel. Hal ini berarti Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupaya membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berperan penting sebagai motor penggerak birokrasi di daerah. Selain itu, penguatan koordinasi internal antar biro di lingkungan Setda juga menjadi prioritas agar fungsi kesekretariatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan pimpinan dapat berjalan sinergis dan terpadu.

Disamping itu juga, Sekretariat Daerah sebagai unsur pelaksana administratif utama memegang peran penting dalam menyediakan layanan administrasi yang mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perangkat daerah, berjalan dengan optimal. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penyederhanaan proses birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan standar pelayanan minimal. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan mereka, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki satu tujuan lagi yaitu menguatnya ketentraman di masyarakat. Sebagai provinsi yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama, Sumatera Selatan membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga keharmonisan sosial. Melalui sikap saling menghormati dan kerja sama antarumat beragama, tercipta sinergi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini mendorong umat beragama untuk lebih menghayati ajaran agamanya secara damai dan bertanggungjawab, sekaligus mencegah perpecahan dan konflik yang dapat merusak kerukunan sosial.

3.1.1 Sasaran

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas melalui penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran ini merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah, sehingga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di periode perencanaan 2025-2029.

Adapun sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan mampu memberikan dampak nyata, baik bagi terwujudnya ekonomi makro daerah, peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik, maupun terciptanya stabilitas sosial di masyarakat.

Sekretariat Daerah bertujuan memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, memiliki sasaran yaitu (1) terselenggaranya koordinasi perumusan dan sinkronisasi kebijakan ekonomi daerah lintas OPD, (2) terwujudnya iklim investasi yang kondusif melalui fasilitasi dan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, dan (3) tersedianya data dan informasi strategis ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, Sekretariat Daerah harus memiliki sasaran diantaranya (1) meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN di lingkungan Setda, (2) terbangunnya sistem manajemen kinerja ASN yang terintegrasi dan berbasis digital, serta (3) terimplementasinya budaya kerja berbasis meritokrasi, disiplin, dan etika pelayanan publik.

Selain itu, sasaran ini juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar aparatur dapat bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan sistem manajemen berbasis teknologi informasi menjadi bagian penting dalam sasaran ini, guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pengawasan internal.

Lebih jauh, sasaran ini juga mencakup upaya memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin agar setiap biro mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan pelayanan yang semakin berkualitas ini, diharapkan juga dengan kondisi sosial yang aman, tertib dan harmonis yang merupakan modal dasar bagi kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena hal tersebut berhubungan dengan tujuan terakhir Sekretariat Daerah dalam memperkuat koordinasi untuk menjaga ketentraman dan kerukunan sosial, dengan mengacu pada sasaran (1) meningkatnya efektivitas koordinasi dengan Forkopimdo dan instansi keamanan untuk menjaga stabilitas sosial, (2) terfasilitasinya kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama, toleransi dan kebhinekaan, dan (3) tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya untuk prioritas Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi								
		Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	1)Tingkat Inflasi 2)Inklusi Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	%
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi								
		1) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1) Nilai SAKIP 2) Indeks Pelayanan Publik	BB 5,88	12 5,90	12 5,90	12 5,90	12 5,90	12,5 5,90	12,5 5,90	Nilai (AKIP Pelaporan) Indeks
	Terwujudnya stabilitas sosial		Indeks Harmoni Indonesia								
		Menguatnya ketentraman di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	7,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,1	Indeks

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Setda

3.2.1 Strategi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan cepat berubah baik di tingkat Nasional maupun Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun strategi Renstra yang fokus pada optimalisasi sumber daya, tahapan implementasi yang terukur, penentuan fokus prioritas, serta penyusunan program dan kegiatan secara sistematis.

Strategi ini diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal, serta memperkuat peran Setda sebagai motor penggerak birokrasi provinsi. Langkah-langkah strategis Setda tersebut diantaranya :

a. Optimalisasi Sumber Daya

Sebagai penggerak utama roda birokrasi, ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memiliki kapasitas dan karakter yang mumpuni. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM difokuskan pada tiga aspek utama :

1) Peningkatan Kompetensi ASN

Aparatur Sipil Negara perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika tugas pemerintahan. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi : Pelatihan Teknis (Bimbingan Teknis), diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan keahlian sesuai unit kerja masing-masing, seperti administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengarsipan, dan pelayanan publik.

Selanjutnya bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (Diklat) yang bertujuan agar para pejabat memiliki kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan.

Di sisi lain, literasi digital perlu diperkuat

mengingat transformasi digital dalam sistem pemerintahan sudah tidak dapat dihindari, sehingga penguatan pemahaman ASN terhadap sistem informasi pemerintahan (seperti e-office, e-arsip, e-Sakip, e-Monev, e-Kinerja) harus menguasai penggunaan aplikasinya agar proses kerja lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik guna menunjang efektivitas kerja sehari-hari.

2) Penguatan Budaya Kerja

Dalam kondisi lingkungan kerja yang menuntut kolaborasi lintas bidang, budaya kerja ASN di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus diarahkan pada nilai-nilai kerja yang selaras dengan prinsip berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Hal ini berarti setiap ASN tidak hanya bekerja secara individual, tetap mampu membangun sinergi dengan bagian lain untuk mencapai tujuan bersama.

3) Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier

Kondisi pengelolaan SDM di era sekarang mengharuskan adanya sistem evaluasi yang objektif, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi kinerja tidak hanya didasarkan pada kehadiran, tetapi lebih pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran kerja pegawai (SKP).

Hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam pengembangan karier, sehingga promosi jabatan maupun kesempatan mengikuti pelatihan didasarkan pada prestasi kerja, bukan semata-mata faktor senioritas. Setiap ASN dipetakan potensinya agar ditempatkan sesuai kompetensi, dan diarahkan pada posisi yang bisa memaksimalkan kontribusinya.

b. Tahapan Implementasi Strategi

Strategi Sekretariat Daerah dijalankan secara bertahap selama periode Renstra (5 Tahun) dengan pendekatan berkelanjutan, yaitu :

- ✓ Tahun I (Perencanaan), fokusnya adalah mengubah strategi dari konsep menjadi rencana aksi yang konkret dan terukur.

- ✓ Tahun II-III (Pelaksanaan), berfokus pada waktu untuk mengeksekusi semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- ✓ Tahun IV (Evaluasi), bertujuan mengukur kinerja dan mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan.
- ✓ Tahun V (Penyesuaian), berfokus pada perbaikan dan penyesuaian strategi untuk masa depan.

Untuk penjelasan dari masing-masing tahapan di atas, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fokus Utama : Penataan dasar Langkah Strategis : - Penyusunan rencana aksi - Pembentukan tim implementasi - Alokasi sumber daya - Perbaikan sistem kerja dan SOP	Fokus Utama : Penguatan Tata Kelola Langkah Strategis : - Implementasi tata kelola berbasis kinerja - Penguatan koordinasi lintas bagian - Pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Fokus utama : Digitalisasi Administrasi Langkah Strategis : - Penerapan sistem e-Government secara luas (e-office, e-surat, e-Sakip, dll) - Pelatihan literasi digital ASN - Optimalisasi layanan administrasi pimpinan	Fokus utama : Evaluasi berkelanjutan Langkah Strategis : - Pengukuran Kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan - Pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak - Analisis hasil; data kinerja dan umpan balik	Fokus Utama : Evaluasi Menyeluruh Langkah Strategis : - Evaluasi pencapaian sasaran Renstra - Perbaikan kelemahan dan penguatan program - Penyusunan rencana strtegis baru

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Kondisi yang diharapkan : terbangunnya kesamaan persepsi, struktur kerja yang jelas, dan SDM mulai ditempatkan sesuai kompetensi	Kondisi yang diharapkan : tata kelola semakin akuntabel, kondisi lebih lancar, dan kinerja mulai terukur dengan indikator jelas	Kondisi yang diharapkan : administrasi lebih cepat, efisien, transparan, dan pelayanan internal semakin berkualitas	Kondisi yang diharapkan : layanan dan tata kelola semakin merata, inovasi berhasil direplikasi, koordinasi antar OPD makin solid	Kondisi yang diharapkan : seluruh capaian dapat diukur, kelemahan teratasi, dan Sekretariat Daerah semakin berperan sebagai pusat koordinasi daerah

Dengan tahapan Renstra yang sistematis seperti ini, Sekretariat Daerah memastikan setiap langkah diambil secara terukur, tidak tergesa-gesa, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, tetapi sebuah proses sistematis yang melibatkan setiap komponen organisasi, dari sumber daya manusia hingga teknologi, demi mencapai tujuan akhir; pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efisien.

c. Fokus Strategis

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Sekretariat Daerah Sumatera Selatan menetapkan 3

(tiga) fokus utama yaitu :

1) Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Saat ini kondisi birokrasi Sekretariat Daerah masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, proses kerja yang panjang, dan koordinasi antarbagian yang belum optimal. Untuk memperkuat tata kelola OPD, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil tiga langkah utama.

Pertama, melakukan reformasi birokrasi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan melayani. Reformasi dalam hal ini juga mencakup pembenahan pola kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan profesionalisme ASN. Kedua, dilakukan penataan struktur dan fungsi organisasi agar lebih ramping, responsif dan sesuai dengan kebutuhan aktual pemerintahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbagian. Ketiga, dilakukan penyederhanaan proses bisnis, yaitu memangkas alur kerja yang terlalu panjang menjadi lebih ringkas, jelas dan berbasis teknologi informasi.

2) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Akuntabilitas kinerja dan keuangan menjadi hal yang sangat krusial di lingkungan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik. Untuk memperkuat hal tersebut, Setda Sumsel mendorong penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan jelas antara input, output, dan outcome.

Disamping itu juga, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala sebagai langkah pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan. Tak kalah penting, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik juga dilakukan dengan membuka akses informasi publik secara luas, termasuk publikasi capaian kinerja dan laporan keuangan secara rutin.

3) Peningkatan Peran Strategis Sumsel di Tingkat Nasional

Saat ini, Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung energi nasional, terus diperkuat dengan peran strategis yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui peran dukungan koordinatif terhadap program strategis nasional, misalnya dengan memfasilitasi percepatan proyek-proyek prioritas yang didukung pemerintah pusat.

Selain itu, dilakukan advokasi dan komunikasi kebijakan pusat-daerah, yaitu memperkuat hubungan kelembagaan dan diplomasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan kementerian/lembaga agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah. Langkah lainnya adalah penguatan daya saing birokrasi di tingkat regional, dengan meningkatkan kapasitas ASN, mempercepat pelayanan, dan membangun citra birokrasi Sumsel yang profesional dan kompetitif.

d. Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan :

✓ **8 Program Utama**, antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Penataan Organisasi
- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Program Kesejahteraan Rakyat

- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

✓ **30 Kegiatan Turunan**, yang mencakup :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum

- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

✓ **Lebih dari 100 Sub-Kegiatan**, contohnya :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- Penataan Analisis Jabatan
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

- Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Sosial
- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 2025-2029 akan dijabarkan di Bab IV.

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan peran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai motor penggerak koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, diperlukan pemetaan yang jelas terhadap lokus tugas dan fungsi setiap biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Lokus di sini berarti ruang lingkup tugas, fungsi, dan fokus pelayanan strategis yang menjadi tanggung jawab masing-masing biro.

Berikut tabel Lokus 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Biro	Lokus (Ruang Lingkup Tugas/Fokus)
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, fasilitasi pilkada, hubungan antar pemerintah
2	Biro Hukum dan HAM	Penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, penyuluhan hukum, fasilitasi perlindungan dan pemajuan HAM
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Urusan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Biro Perekonomian	Kebijakan ekonomi daerah, investasi, perdagangan, energi, pengelolaan sumber daya alam, serta koordinasi dunia usaha
5	Biro Administrasi Pembangunan	Perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan sistem pengadaan, e-procurement, transparansi dan efisiensi belanja daerah
7	Biro Organisasi	Penataan organisasi perangkat daerah, analisis jabatan, tata laksanaan, reformasi birokrasi, peningkatan kinerja ASN
8	Biro Umum dan Perlengkapan	Administrasi Umum, pengelolaan aset, rumah tangga pemerintahan, sarana dan prasarana, dan pelayanan operasional
9	Biro Humas dan Protokol	Hubungan masyarakat, publikasi kebijakan, dokumentasi, komunikasi publik, serta tata protokol pimpinan daerah

Di samping itu juga, untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang terukur, maka arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinatif dan administratif secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan nasional, sehingga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode RPJMD.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Setda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Setda	Ket.
1.	Mengawal pengendalian inflasi daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga dan pasokan barang strategis dapat terjaga dan mendukung stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1. Penguatan fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam pengendalian inflasi daerah 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung TPID	Misi 2; berfokus pada Biro Perekoniman Setda Prov. Sumsel
2.	Melakukan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyusunan roadmap transformasi digital pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas dan informasi	1. Penguatan koordinasi dan tata kelola implementasi SPBE di lingkungan Setda Prov. Sumsel 2. Pengembangan layanan pemerintahan digital yang terpadu dan mudah diakses	Misi 6; berfokus pada Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi pembangunan, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Setda	Ket.
3.	Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan mendorong kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan inklusif	Penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan	1. Fasilitasi dan dukungan kegiatan seni, budaya, dan kearifan lokal 2. Pengembangan program edukasi nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan	Misi 7; berfokus pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel

Dari ketiga arah kebijakan RPJMD yaitu peningkatan efektivitas TPID, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi, serta penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan menegaskan peran strategis Setda sebagai penggerak utama koordinasi lintas perangkat daerah.

Melalui penurunan arah kebijakan tersebut ke dalam Renstra Setda, diharapkan :

- ✓ Stabilitas ekonomi daerah terjaga melalui penguatan peran TPID dalam pengendalian inflasi secara terkoordinasi, berbasis data, dan responsif terhadap gejolak harga.
- ✓ Kualitas tata kelola pemerintahan meningkat melalui percepatan transformasi digital, integrasi data dan informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam budaya kerja digital.
- ✓ Kehidupan sosial masyarakat semakin harmonis melalui pelestarian budaya lokal, penguatan nilai toleransi, dan pembinaan moderasi beragama secara kolaboratif.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi, serta memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seluruh program dan kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mendukung koordinasi pembangunan lintas sektor, serta menunjang pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan **dalam** menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu Tahun **2025-2029**.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah ke depan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun, sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja. Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan :

✓ **8 Program Utama**, antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Penataan Organisasi
- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

✓ **30 Kegiatan Turunan**, yang mencakup :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

✓ **Lebih dari 100 Sub-Kegiatan**, contohnya :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- Penataan Analisis Jabatan
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Sosial
- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 2025-2029 sebagaimana **disajikan** pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Pemenuhan Layanan Kerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Persentase	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya kendaraan dinas operasional jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan	Prosentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persentase	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang dilaksanakan	Persentase	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersusun Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	Persentase	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sub Kegiatan Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitas	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik				Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Biro Hukum
			Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Hukum
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Hukum
				Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Hukum
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Biro Hukum
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Hukum
					Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Biro Hukum
				Tersedianya administrasi jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Hukum
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah		Biro Hukum
				Tersedianya administrasi Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
				Tersedianya administrasi Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum
				Tersedianya pakaian dinas lapangan	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan	Pengadaan Pakaian Dinas	Biro Hukum

					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Biro Hukum
				Tersedianya kendaraan dinas operasional jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Hukum
				Tersedianya Informasi Teknologi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Biro Hukum
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Hukum
					Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
					Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku		Biro Hukum
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
				terlaksananya Fasilitas dan evaluasi Produk Hukum Kabupaten/kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum
			Terlaksananya Koordinasi antara perangkat daerah dalam bidang hukum		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
				Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Biro Hukum
				Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum
						Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan kehidupan beragama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada						Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat

			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Sumsel Religius, Toleransi dan kebudayaan				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Sarana dan prasarana Spiritual	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Jumlah Sarana dan prasarana Spiritual yang dikelola	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Biro Kesejahteraan Rakyat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.3.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro Perekonomian
				Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.3.2. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.3.3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.3.4. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.3.5. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.3.6. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.4.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.2. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1.4.3. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1.6.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditetapkan Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1.7.1. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Biro Perekonomian
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	2. Program Penataan Organisasi	Biro Perekonomian
			Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	2.1.2. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Biro Perekonomian
				Tersusunya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	2.1.3. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Biro Perekonomian

			Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Ditetapkan Dokumen Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Perencanaan
				Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.2.1. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Perencanaan
				Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Provinsi dan Setda)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2.2.2. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Perencanaan
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	2.2.3. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Biro Perencanaan
				Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	2.2.4. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Perencanaan
				Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	2.2.5. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Perencanaan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan							Biro Administrasi Pembangunan
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan						Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi					Biro Administrasi Pembangunan
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Administrasi Pembangunan
				meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
				Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Biro Administrasi Pembangunan
				Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Biro Administrasi Pembangunan
				Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	
				meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
				Tersedianya analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah disediakan	Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
				Tersusunnya pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
				Terlaksananya fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.	Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatnya persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatnya persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terkelolanya informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatnya persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Biro Organisasi
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Organisasi
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Organisasi
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Organisasi
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.3.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro Organisasi
				Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.3.2. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Biro Organisasi
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.3.3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Biro Organisasi
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.3.4. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Biro Organisasi
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.3.5. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Organisasi
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.3.6. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Organisasi
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.4.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Organisasi
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.2. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Organisasi
				Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1.4.3. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Biro Organisasi

			Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Organisasi
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Organisasi
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1.6.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditetapkan Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1.7.1. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Biro Organisasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Biro Organisasi
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	2. Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	2.1.2. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Biro Organisasi
				Tersusnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	2.1.3. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Ditetapkan Dokumen Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
				Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.2.1. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
				Tersusnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Provinsi dan Setda)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2.2.2. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	2.2.3. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Biro Organisasi
				Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	2.2.4. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi
				Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	2.2.5. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik				Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi		Biro Umum dan Perlengkapan
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan		Biro Umum dan Perlengkapan
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Biro Umum dan Perlengkapan
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun		Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
			Meningkatnya pelayanan KDH dan WKDH indikator : Persentase jenis pelayanan KDH dan WKDH	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan

				Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan

				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	Pengadaan Alat Besar	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan

					Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan

					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
					Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik				Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi		Biro Humas dan Protokol
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Humas dan Protokol			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Humas dan Protokol		Biro Humas dan Protokol
			Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Humas dan Protokol

					Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	Sub Penyiapan Materi pimpinan	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol
					Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Humas dan Protokol
				Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Biro Humas dan Protokol

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN		
			TARGET	2025		2026		TARGET	2027		2028		2029			2030	
				PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
Sekretariat Daerah																	
Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Provinsi	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.548.386.577	90%	871.078.016	90%	760.084.000	90%	2.314.435.000	90%	1.549.435.000	90%	1.899.435.000	90%	1.485.310.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan	161.760.000		135.480.000		192.480.000		156.840.000		156.840.000		156.840.000		156.840.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161.760.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	135.480.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	192.480.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan	41.040.000	1 (satu) Orang KPA	31.080.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan	120.720.000	5 (lima) Orang PPTK	104.400.000	5 (lima) Orang PPTK	135.240.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fomal	-		-		-		64.125.000		64.125.000		64.125.000		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	3 (tiga) Orang	-	3 (tiga) Orang	-	3 (tiga) Orang	64.125.000	3 (tiga) Orang	64.125.000	3 (tiga) Orang	64.125.000	3 (tiga) Orang	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	3 (tiga) Orang	-	3 (tiga) Orang	-	3 (tiga) Orang	64.125.000	3 (tiga) Orang	64.125.000	3 (tiga) Orang	64.125.000	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	547.398.577		260.000.000		260.492.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	15.080.000	32 (tiga puluh dua) item	10.000.000	32 (tiga puluh dua) item	10.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	15.080.000	32 (tiga puluh dua) item	10.000.000	32 (tiga puluh dua) item	10.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	32 (tiga puluh dua) item	20.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.318.577	80 Kali	250.000.000	80 Kali	250.492.000	80 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	532.318.577	80 Kali	250.000.000	80 Kali	250.492.000	80 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	81 Kali	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-	-	-		160.000.000		765.000.000		-		350.000.000		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang tersedia	-	-	-		-		765.000.000		-		-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiional Mobil (R4)	-	Unit	-	Unit	-	1 Unit	700.000.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiional Motorl (R2)	-	Unit	-	Unit	-	2 Unit	65.000.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	-	-	-		160.000.000	Unit	-	Unit	-		350.000.000	Unit	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
	Jumlah Komputer, Printer , Laptop yang tersedia	-		-	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop	160.000.000		-		-	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop	350.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	839.228.000,00		475.598.016		147.112.000		808.470.000		808.470.000		808.470.000		808.470.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor Yang disediakan	839.228.000	29 Orang	475.598.016	4 Orang	147.112.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	839.228.000	29 Orang	475.598.016	4 Orang	147.112.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	29 Orang	808.470.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	22.362.646.423	90%	63.998.707.550	90%	89.087.147.507	90%	5.500.000.000	90%	6.550.000.000	90%	6.550.000.000	90%	7.200.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	1.250.000.000		902.768.000		1.700.000.000		2.900.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		3.250.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	650.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	443.600.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	500.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	1.050.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	1.050.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	1.050.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	1.050.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	430.000.000	75 Kecamatan	221.800.000	75 Kecamatan	250.000.000	75 Kecamatan	350.000.000	75 Kecamatan	350.000.000	75 Kecamatan	350.000.000	75 Kecamatan	350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	220.000.000	1 (satu) Laporan	221.800.000	1 (satu) Laporan	250.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Daerah	600.000.000	322 Dokumen	459.168.000	322 Dokumen	1.200.000.000	322 Dokumen	1.850.000.000	322 Dokumen	2.050.000.000	322 Dokumen	2.050.000.000	322 Dokumen	2.200.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan yg di fasilitasi	50.000.000	2 Kecamatan	81.370.000	2 Kecamatan	200.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	2 Kecamatan	500.000.000	2 Kecamatan	500.000.000	2 Kecamatan	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	200.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	143.665.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	500.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	600.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	600.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	600.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	600.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	150.000.000	3 Lokasi	81.944.000	3 Lokasi	300.000.000	3 Lokasi	400.000.000	3 Lokasi	450.000.000	3 Lokasi	450.000.000	3 Lokasi	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	200.000.000	10 Pilar	152.189.000	10 Pilar	200.000.000	10 Pilar	450.000.000	10 Pilar	500.000.000	10 Pilar	500.000.000	10 Pilar	600.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	2.751.232.000		2.585.939.550		1.700.000.000		1.900.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.950.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.050.000.000	100 Dokumen	1.586.699.550	100 Dokumen	550.000.000	106 Dokumen	700.000.000	114 Dokumen	1.100.000.000	120 Dokumen	1.100.000.000	128 Dokumen	1.200.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	340.600.000	30 Dokumen	160.000.000	30 Dokumen	150.000.000	32 Dokumen	200.000.000	34 Dokumen	300.000.000	36 Dokumen	300.000.000	38 Dokumen	400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	18.400.000	40 kali	115.000.000	40 kali	250.000.000	42 kali	150.000.000	46 kali	400.000.000	48 kali	400.000.000	50 kali	400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Izin yang diterbitkan	130.000.000	30 Surat Izin	132.000.000	30 Surat Izin	150.000.000	32 Surat Izin	350.000.000	34 Surat Izin	400.000.000	36 Surat Izin	400.000.000	40 Surat Izin	400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada Yg dilaksanakan	561.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	-	-	1.179.699.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.701.232.000	61 Dokumen	999.240.000	61 Dokumen	1.150.000.000	61 Dokumen	1.200.000.000	61 Dokumen	1.550.000.000	61 Dokumen	1.550.000.000	61 Dokumen	1.750.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Jumlah Dokumen RLPPD Prov. Sumsel	235.916.400	55 Buku	120.000.000	55 Buku	100.000.000	55 Buku	200.000.000	55 Buku	250.000.000	55 Buku	250.000.000	55 Buku	400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen LPPD Prov. Sumsel	874.090.750	2 Dokumen (120 buku)	359.240.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran	337.666.600	3 dokumen	400.000.000	3 dokumen	450.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	500.000.000	3 dokumen	500.000.000	3 dokumen	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota	253.558.250	1 (satu) Laporan	120.000.000	1 (satu) Laporan	100.000.000	1 (satu) Laporan	200.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi	18.361.414.423	62 Dokumen	60.510.000.000	62 Dokumen	85.687.147.507	72 Dokumen	700.000.000	82 Dokumen	800.000.000	92 Dokumen	800.000.000	102 Dokumen	1.000.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	21 Dokumen	31 Dokumem	26 Dokumen	31 Dokumem	85.687.147.507	36 Dokumem	700.000.000	41 Dokumem	800.000.000	46 Dokumem	800.000.000	51 Dokumem	1.000.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI	494.916.401	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	215.000.000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	300.000.000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	350.000.000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	400.000.000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	400.000.000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	332.157.022	25 Dokumen	295.000.000	25 Dokumen	387.147.507	30 Dokumen	350.000.000	35 Dokumen	400.000.000	40 Dokumen	400.000.000	45 Dokumen	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Puslatput Kodiklat-AD	6.034.341.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II Sriwijaya (Pembangunan Kolam Renang Jasdarn II Sriwijaya Palembang)	9.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan)	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel (Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Pintu)	-	-	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdarn II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdarn II/SWJ)					11.490.604.470									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)					53.509.395.530									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As-Ops, As-Intel,As-Ter, Dokter,Ka. Pendarn, Ka. Infolahadarn, Ka. Bintaldarn dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintrarn)					10.000.000.000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsel (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumsel)					4.000.000.000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)					6.000.000.000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		23.911.033.000		64.869.785.566		89.847.231.507		7.814.435.000		8.099.435.000		8.449.435.000		8.685.310.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT (1)	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT (2)	BASELINE 2024 (3)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN (15)
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET (4)	PAGU (4)	TARGET (5)	PAGU (6)	TARGET (7)	PAGU (8)	TARGET (9)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.729.000.000	100%	2.000.824.779	100%	1.809.260.000	100%	1.863.968.621	100%	1.939.383.171	100%	2.041.071.120	100%	2.172.253.406	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.480.000	100%	90.100.000	100%	90.100.000	100%	100.100.000	100%	120.100.000	100%	134.560.000	100%	141.016.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.480.000	1 Dokumen	90.100.000	1 Dokumen	90.100.000	1 Dokumen	100.100.000	1 Dokumen	120.100.000	1 Dokumen	134.560.000	1 Dokumen	141.016.000	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.690.000	100%	363.671.164	100%	457.860.000	100%	470.000.000	100%	500.000.000	100%	520.000.000	100%	550.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.000.000	2 Paket	13.671.164	1 Paket	58.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Gubernur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Gubernur	484.690.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	399.860.000	1 Paket	410.000.000	1 Paket	430.000.000	1 Paket	440.000.000	1 Paket	460.000.000	Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.051.830.000	100%	708.590.735	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	736.511.120	100%	750.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.051.830.000	1 Laporan	708.590.735	1 Laporan	665.000.000	1 Laporan	665.000.000	1 Laporan	665.000.000	1 Laporan	736.511.120	1 Laporan	750.000.000	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah		100%	156.500.000	100%	126.300.000	100%	273.868.621	100%	305.000.000	100%	300.000.000	100%	336.237.406	Biro Hukum
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	85.000.000	16 Orang	126.300.000	16 Orang	200.000.000	16 Orang	220.000.000	16 Orang	200.000.000	16 Orang	221.237.406	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan		5 orang	71.500.000			8 Orang	40.000.000	8 Orang	50.000.000	8 Orang	60.000.000	8 Orang	70.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan		-	-			54 orang	33.868.621	54 orang	35.000.000	54 orang	40.000.000	54 orang	45.000.000	Biro Hukum
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	33.000.000	100%	681.962.880	100%	470.000.000	100%	305.000.000	100%	349.283.171	100%	350.000.000	100%	395.000.000	Biro Hukum

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	315.382.880	4 Unit	170.000.000	3 Unit	90.000.000	4 Unit	120.000.000	5 Unit	150.000.000	6 Unit	180.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33.000.000	8 Unit	366.580.000	1 Paket	300.000.000	9 Unit	215.000.000	1 Paket	229.283.171	1 Paket	200.000.000	1 Paket	215.000.000	Biro Hukum
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase							50.000.000							Biro Hukum
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							25.000.000							Biro Hukum
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							25.000.000							Biro Hukum
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	1.591.364.000	100%	1.617.598.061	100%	2.109.162.840	100%	2.080.537.266	100%	2.164.713.994	100%	2.278.216.746	100%	2.424.640.689	Biro Hukum
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai	641.214.805	100%	540.794.866	100%	661.766.544	100%	763.791.696	100%	795.000.000	100%	808.030.000	100%	874.640.689	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	217.015.210	34 Dokumen	175.544.866	36 Dokumen	215.000.000	43 Dokumen	230.000.000	46 Dokumen	245.000.000	48 Dokumen	250.000.000	50 Dokumen	265.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	70.000.000	780 Dokumen	53.000.000	825 Dokumen	113.826.719	828 Dokumen	150.791.696	31 Dokumen	140.000.000	834 Dokumen	145.000.000	837 Dokumen	155.692.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola	95.000.000	110 Dokumen	107.250.000	75 Dokumen	117.250.000	78 Dokumen	143.000.000	31 Dokumen	150.000.000	84 Dokumen	153.030.000	87 Dokumen	173.948.689	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	259.199.595	510 Dokumen	205.000.000	530 Dokumen	215.689.825	540 Dokumen	240.000.000	550 Dokumen	260.000.000	560 Dokumen	260.000.000	570 Dokumen	280.000.000	Biro Hukum
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	950.149.195	100%	1.076.803.195	100%	1.447.396.296	100%	1.316.745.570	100%	1.369.713.994	100%	1.470.186.746	100%	1.550.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	868.149.195	53 Kasus	976.325.295	60 Kasus	1.336.300.496	65 Kasus	1.191.745.570	70 Kasus	1.237.713.994	75 Kasus	1.335.186.746	80 Kasus	1.400.000.000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	82.000.000	3 kasus	100.477.900	4 Kasus	111.095.800	4 Kasus	125.000.000	4 Kasus	132.000.000	4 Kasus	135.000.000	4 Kasus	150.000.000	Biro Hukum
		3.320.364.000		3.618.422.840		3.918.422.840		3.944.505.887		4.104.097.165		4.319.287.866		4.596.894.095	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti	2.293.925.800		2.874.867.180		3.041.782.698		3.345.960.968		3.680.557.065		4.048.612.772		4.453.474.049	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000		177.156.100		194.871.710	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	4 Laporan	121.000.000	4 Laporan	133.100.000	4 Laporan	146.410.000	4 Laporan	161.051.000	4 Laporan	177.156.100	4 Laporan	194.871.710	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.292.000		189.392.000		188.892.000		207.781.200		228.559.320		251.415.252		276.556.777	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.292.000	6 Laporan	189.392.000	6 Laporan	188.892.000	6 Laporan	207.781.200	6 Laporan	228.559.320	6 Laporan	251.415.252	6 Laporan	276.556.777	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.865.360		96.651.896		106.317.086		116.948.795		128.643.675		141.508.043		155.658.847	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87.865.360	3 Orang	96.651.896	3 Orang	106.317.086	3 Orang	116.948.795	3 Orang	128.643.675	3 Orang	141.508.043	3 Orang	155.658.847	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.948.440		975.903.284		1.184.043.612		1.302.447.973		1.432.692.770		1.575.962.047		1.733.558.252	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100.000.000	10 paket	110.000.000	10 paket	121.000.000	10 paket	133.100.000	10 paket	146.410.000	10 paket	161.051.000	10 paket	177.156.100	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42.548.440	6 Paket	46.803.284	6 Paket	51.483.612	6 Paket	56.631.973	6 Paket	62.295.170	6 Paket	68.524.687	6 Paket	75.377.156	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.400.000	150 Laporan	819.100.000	150 Laporan	1.011.560.000	150 Laporan	1.112.716.000	150 Laporan	1.223.987.600	150 Laporan	1.346.386.360	150 Laporan	1.481.024.996	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	345.000.000		702.500.000		632.750.000		696.025.000		765.627.500		842.190.250		926.409.275	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	70.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	330.000.000	2 Unit	363.000.000	2 Unit	399.300.000	2 Unit	439.230.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	275.000.000	15 Unit	302.500.000	15 Unit	332.750.000	15 Unit	366.025.000	15 Unit	402.627.500	15 Unit	442.890.250	15 Unit	487.179.275	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.820.000		716.820.000		716.820.000		788.502.000		867.352.200		954.087.420		1.049.496.162	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	716.820.000	24 Laporan	716.820.000	24 Laporan	716.820.000	24 Laporan	788.502.000	24 Laporan	867.352.200	24 Laporan	954.087.420	24 Laporan	1.049.496.162	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		96.630.600		106.293.660		116.923.026	Biro Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	66.000.000	10 Unit	72.600.000	10 Unit	79.860.000	10 Unit	87.846.000	10 Unit	96.630.600	10 Unit	106.293.660	10 Unit	116.923.026	Biro Kesejahteraan Rakyat
															Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	37.257.934.200		37.759.632.820		25.452.487.302		27.997.736.032		30.797.509.635		33.877.260.598		37.264.986.658	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	36.361.934.200		36.784.732.820		24.333.267.302		26.766.594.032		29.443.253.435		32.387.578.778		35.626.336.656	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan prasarana Spiritual yang dikelola	17.405.000.000	10 unit	20.510.000.000	10 unit	7.063.050.000	10 unit	7.769.355.000	10 unit	8.546.290.500	10 unit	9.400.919.550	10 unit	10.341.011.505	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	18.956.934.200	7 lembaga	16.274.732.820	7 lembaga	17.270.217.302	7 lembaga	18.997.239.032	7 lembaga	20.896.962.935	7 lembaga	22.986.659.228	7 lembaga	25.285.325.151	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	437.000.000		447.700.000		492.470.000		541.717.000		595.888.700		655.477.570		721.025.327	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	77.000.000	1 Dokumen	84.700.000	1 Dokumen	93.170.000	1 Dokumen	102.487.000	1 Dokumen	112.735.700	1 Dokumen	124.009.270	1 Dokumen	136.410.197	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	1 Dokumen	241.576.500	1 Dokumen	265.734.150	1 Dokumen	292.307.565	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	195.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	1 Dokumen	241.576.500	1 Dokumen	265.734.150	1 Dokumen	292.307.565	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	459.000.000		527.200.000		626.750.000		689.425.000		758.367.500		834.204.250		917.624.675	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	275.000.000	1 Dokumen	302.500.000	1 Dokumen	332.750.000	1 Dokumen	366.025.000	1 Dokumen	402.627.500	1 Dokumen	442.890.250	1 Dokumen	487.179.275	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	77.000.000	1 Dokumen	84.700.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	169.400.000	1 Dokumen	186.340.000	1 Dokumen	204.974.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	107.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	169.400.000	1 Dokumen	186.340.000	1 Dokumen	204.974.000	1 Dokumen	225.471.400	Biro Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH		39.551.860.000		40.634.500.000		28.494.270.000		31.343.697.000		34.478.066.700		37.925.873.370		41.718.460.707	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	169.886.000	100%	169.886.000	100%	169.886.000	100%	169.886.000	100%	169.886.000	100%	169.886.000	Biro Perekonomian
Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 166.142.500	12 Dokumen	169.886.000	1 tahun	169.886.000	1 tahun	169.886.000	1 tahun	169.886.000	1 tahun	169.886.000	100%	169.886.000	Biro Perekonomian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	297.793.000	100%	297.793.000	100%	317.793.000	100%	327.793.000	100%	332.793.000	100%	332.793.000	Biro Perekonomian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Rp 103.947.500	1 Paket	112.000.000	1 Paket	112.000.000	1 Paket	112.000.000	1 Paket	112.000.000	1 Paket	112.000.000	100%	112.000.000	Biro Perekonomian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 296.600.000	1 laporan	185.793.000	1 laporan	185.793.000	1 laporan	205.793.000	1 laporan	215.793.000	1 laporan	220.793.000	100%	220.793.000	Biro Perekonomian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	77.818.000	100%	188.561.144	100%	188.561.144	100%	188.561.144	100%	188.561.144	100%	188.561.144	Biro Perekonomian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Rp 150.092.150	6 unit	77.818.000	6 unit	188.561.144	6 unit	188.561.144	6 unit	188.561.144	6 unit	188.561.144	100%	188.561.144	Biro Perekonomian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	185.743.144	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Biro Perekonomian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 375.661.000	12 orang	185.743.144	2 orang	75.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	75.000.000	100%	75.000.000	Biro Perekonomian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian
Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian
Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian
Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan		-	25.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	Biro Perekonomian

Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana															Biro Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia		100%	820.481.900	100%	820.481.900	100%	840.481.900	100%	850.481.900	100%	870.481.900	100%	880.481.900		Biro Perekonomian
1. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp	557.924.000	2 Dokumen	489.313.500	2 Dokumen	489.313.500	2 Dokumen	509.313.500	2 Dokumen	519.313.500	2 Dokumen	529.313.500	100%	539.313.500	Biro Perekonomian
2. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp	305.500.000	2 Dokumen	331.168.400	2 Dokumen	331.168.400	2 Dokumen	331.168.400	2 Dokumen	331.168.400	2 Dokumen	341.168.400	100%	341.168.400	Biro Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik			100%	821.478.575	100%	907.069.575	100%	907.069.575	100%	907.069.575	100%	917.069.575	100%	917.069.575	Biro Perekonomian
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp	177.469.250	2 Dokumen	224.786.000	2 Dokumen	229.786.000	2 Dokumen	229.786.000	2 Dokumen	229.786.000	2 Dokumen	239.786.000	100%	239.786.000	Biro Perekonomian
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp	270.100.000	1 Dokumen	238.188.125	1 Dokumen	318.779.125	1 Dokumen	318.779.125	1 Dokumen	318.779.125	1 Dokumen	318.779.125	100%	318.779.125	Biro Perekonomian
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp	98.984.250	1 Dokumen	358.504.450	1 Dokumen	358.504.450	1 Dokumen	358.504.450	1 Dokumen	358.504.450	1 Dokumen	358.504.450	100%	358.504.450	Biro Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD			55%	900.870.000	64%	900.870.000	70%	947.361.540	75%	1.016.015.369	80%	1.071.885.544	80%	1.155.027.473	Biro Perekonomian
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	157.600.000	1 Dokumen	128.068.350	1 Dokumen	128.068.350	1 Dokumen	128.068.350	1 Dokumen	128.068.350	1 Dokumen	138.068.350	100%	148.068.350	Biro Perekonomian
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		-	1 Dokumen	103.412.500	1 Dokumen	103.412.500	1 Dokumen	103.412.500	1 Dokumen	103.412.500	1 Dokumen	113.412.500	100%	133.412.500	Biro Perekonomian
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	Rp	571.485.000	2 Dokumen	493.770.500	2 Dokumen	493.770.500	2 Dokumen	540.262.040	2 Dokumen	608.915.869	2 Dokumen	608.915.869	100%	622.057.798	Biro Perekonomian
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		-	1 Dokumen	101.694.650	1 Dokumen	101.694.650	1 Dokumen	101.694.650	1 Dokumen	101.694.650	1 Dokumen	111.694.650	100%	131.694.650	Biro Perekonomian
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	Rp	149.400.000	2 Dokumen	73.924.000	2 Dokumen	73.924.000	2 Dokumen	73.924.000	2 Dokumen	73.924.000	2 Dokumen	99.794.175	100%	119.794.175	Biro Perekonomian
		Rp	3.380.905.650		3.299.070.619		3.459.661.619		3.546.153.159		3.634.806.988		3.725.677.163		3.818.819.092	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	823.404.926	100%	1.134.877.269	100%	1.126.127.269	100%	1.567.712.266	100%	1.624.965.224	100%	1.734.255.684	100%	1.901.835.467	Biro Administrasi Pembangunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.559.300	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	65.000.000	100%	100.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.559.300	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	100.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.160.000	100%	111.160.000	dokumen	111.160.000	100%	111.160.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.186.000	100%	81.000.000	100%	56.000.000	100%	130.000.000	100%	100.000.000	100%	210.000.000	100%	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	51.900.000	30 paket	25.000.000	30 Paket	0	30 Paket	40.000.000			30 paket	60.000.000	30 paket	75.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29.286.000	1 Orang	26.000.000	3 Orang	36.000.000	3 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	3 Orang	75.000.000	4 Orang	100.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	5 Orang	30.000.000	8 Orang	20.000.000	10 Orang	40.000.000	5 orang	50.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	100.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.406.626	100%	279.051.257	100%	233.967.269	100%	291.552.266	100%	350.000.000	100%	469.255.684	100%	525.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63.235.900	1 Paket	31.551.257	1 Paket	33.967.269	1 Paket	41.552.266	1 Paket	75.000.000	1 Paket	139.255.684	1 Paket	175.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.170.726	1 dokumen	247.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	330.000.000	1 dokumen	350.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.520.000	100%	420.000.000	100%	510.000.000	100%	775.000.000	100%	634.965.224	100%	450.000.000	100%	461.835.467	Biro Administrasi Pembangunan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 unit	420.000.000	1 unit	450.000.000	R4 = 1 unit	460.000.000		460.000.000	R2 = 3 unit	90.000.000	R2 = 3 unit	90.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-			-	1 (Satu) unit	200.000.000						-	Biro Administrasi Pembangunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	85.520.000	-		10 unit	60.000.000	5 unit	115.000.000	12 unit	174.965.224	12 unit	360.000.000	12 unit	371.835.467	Biro Administrasi Pembangunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.573.000	100%	223.666.012	100%	195.000.000	100%	230.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	192.573.000	1 Laporan	223.666.012	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Biro Administrasi Pembangunan

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-						-	1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	576.075.167	100%	675.750.000	100%	684.500.000	100%	1.300.000.000	100%	1.445.000.000	100%	1.585.000.000	100%	1.720.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	330.066.933	100%	391.750.000	100%	396.500.000	100%	675.000.000	100%	745.000.000	100%	810.000.000	100%	885.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD	139.494.595	1 laporan	176.250.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	270.000.000	1 laporan	285.000.000	1 laporan	325.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN	89.888.601	1 laporan	91.500.000	1 laporan	91.500.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah	100.683.737	1 laporan	124.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	246.008.234	100%	284.000.000	100%	288.000.000	100%	625.000.000	100%	700.000.000	100%	775.000.000	100%	835.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	59.167.570	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	83.661.780	1 laporan	101.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	103.178.884	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
		1.399.480.093		1.810.627.269		1.810.627.269		2.867.712.266		3.069.965.224		3.319.255.684		3.621.835.467	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.529.400.000	100%	1.561.682.354	100%	776.000.000	100%	1.970.440.289	100%	2.167.484.318	100%	2.384.232.750	100%	2.622.656.025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	250.400.000	100%	251.000.000	100%	251.000.000	100%	257.275.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.400.000	12 Dokumen	251.000.000	12 Dokumen	251.000.000	12 Dokumen	257.275.000	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	500.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana	75.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	94.232.750	100%	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut pelatihan kepemimpinan		3 orang	50.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	94.232.750	5 orang	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani	75.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	100%	213.165.289	100%	750.000.000	100%	450.000.000	100%	850.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		24 paket	-	24 paket	20.000.000	24 paket	21.000.000	24 paket	250.000.000	24 paket	150.000.000	24 paket	250.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	30 laporan	20.000.000	30 laporan	60.000.000	30 laporan	192.165.289	30 laporan	500.000.000	30 laporan	300.000.000	30 laporan	600.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.000.000	100%	957.000.000	100%	200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	400.000.000	100%	1.200.000.000	100%	600.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		-	-	-	-	8 unit	900.000.000	-	-	-	900.000.000	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	420.000.000	20 unit	957.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	400.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	600.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784.000.000	100%	283.682.354	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	517.484.318	100%	240.000.000	100%	572.656.025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	784.000.000	13 laporan	283.682.354	13 laporan	170.000.000	13 laporan	200.000.000	13 laporan	517.484.318	13 laporan	240.000.000	13 laporan	572.656.025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	4.265.000.000	Level 3	5.171.035.850	Level 3	5.991.345.204	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	6.890.046.985	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	7.923.554.032	Level 4	9.112.087.137	Level 4	10.478.900.208	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1.130.000.000	100%	1.504.041.000	100%	2.100.000.000	100%	2.615.046.985	100%	2.973.554.032	100%	3.500.000.000	100%	4.150.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	185.000.000	4 laporan	320.340.500	4 laporan	300.000.000	4 laporan	350.000.000	4 laporan	450.000.000	4 laporan	500.000.000	4 laporan	750.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	780.000.000	12 laporan	894.000.000	12 laporan	1.500.000.000	12 laporan	1.815.046.985	12 laporan	2.023.554.032	12 laporan	2.500.000.000	12 laporan	2.750.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	165.000.000	12 laporan	289.700.500	12 laporan	300.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	500.000.000	12 laporan	500.000.000	12 laporan	650.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.125.000.000	100%	1.179.700.000	100%	1.400.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.250.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	720.000.000	4 laporan	707.000.000	4 laporan	700.000.000	4 laporan	750.000.000	4 laporan	850.000.000	4 laporan	850.000.000	4 laporan	900.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	195.000.000	4 laporan	320.000.000	4 laporan	400.000.000	4 laporan	450.000.000	4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	4 laporan	700.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	210.000.000	4 laporan	152.700.000	4 laporan	300.000.000	4 laporan	350.000.000	4 laporan	400.000.000	4 laporan	500.000.000	4 laporan	650.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.010.000.000	100%	2.487.294.850	100%	2.491.345.204	100%	2.725.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.712.087.137	100%	4.078.900.208	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	720.000.000	45 orang	1.379.294.850	45 orang	941.345.204	45 orang	950.000.000	45 orang	1.200.000.000	45 orang	1.400.000.000	45 orang	1.400.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	275.000.000	5 dokumen	325.000.000	5 dokumen	850.000.000	5 dokumen	875.000.000	5 dokumen	900.000.000	5 dokumen	1.100.000.000	5 dokumen	1.300.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	1.015.000.000	4 dokumen	783.000.000	4 dokumen	700.000.000	4 dokumen	900.000.000	4 dokumen	1.100.000.000	4 dokumen	1.212.087.137	4 dokumen	1.378.900.208	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		5.794.400.000		6.732.718.204		6.767.345.204		8.860.487.274		10.091.038.350		11.496.319.887		13.101.556.233	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kerja Perangkat Daerah	1.668.609.790	100%	1.180.518.800	100%	1.180.518.800	100%	1.216.215.469	100%	1.265.422.490	100%	1.331.772.564	100%	1.417.367.313	Biro Organisasi
1.1. 1.1.1 Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	21.000.000	100%	21.500.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	1 Dok.	20.500.000	1 Dok.	20.500.000	1 Dok.	21.000.000	1 Dok.	21.500.000	1 Dok.	22.000.000	1 Dok.	23.000.000	Biro Organisasi
1.2. 1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.400.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	178.000.000	100%	182.000.000	100%	185.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.400.000	1 Dok.	170.000.000	1 Dok.	170.000.000	1 Dok.	175.000.000	1 Dok.	178.000.000	1 Dok.	182.000.000	1 Dok.	185.000.000	Biro Organisasi
1.3. 1.3.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.000.000	100%	172.173.200	100%	192.800.000	100%	202.000.000	100%	211.500.000	100%	222.000.000	100%	231.000.000	
13.2. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000	n/a	n/a	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.500.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	13.000.000	Biro Organisasi
1.3.3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	1 Dok.	101.373.200	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	105.000.000	1 Dok.	110.000.000	1 Dok.	115.000.000	1 Dok.	120.000.000	
1.3.4. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	n/a	1 Dok.	30.960.000	1 Dok.	30.960.000	1 Dok.	32.000.000	1 Dok.	33.000.000	1 Dok.	35.000.000	1 Dok.	36.000.000	Biro Organisasi
1.3.5. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a	1 Dok.	31.840.000	1 Dok.	31.840.000	1 Dok.	32.000.000	1 Dok.	33.000.000	1 Dok.	35.000.000	1 Dok.	36.000.000	
1.3.6. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.000.000	10 Orang	8.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	11.000.000	2 orang	12.000.000	2 orang	12.500.000	2 orang	13.000.000	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	21.000.000	5 Orang	n/a	3 Orang	10.000.000	3 Orang	11.000.000	3 Orang	12.000.000	3 Orang	12.500.000	3 Orang	13.000.000	
1.4. 1.4.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.549.790	100%	344.700.000	100%	391.368.800	100%	399.000.000	100%	407.500.000	100%	418.000.000	100%	473.124.313	Biro Organisasi
1.4.2. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100.000.000	1 Paket	91.000.000	1 Paket	91.000.000	1 Paket	93.000.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	98.000.000	1 Paket	100.000.000	
1.4.3. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.549.790	1 Laporan	226.500.000	1 Laporan	250.368.800	1 Laporan	256.000.000	1 Laporan	260.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	317.124.313	Biro Organisasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	n/a	1 Dok.	27.200.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	52.500.000	1 Dok.	55.000.000	1 Dok.	56.000.000	
1.5.1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	100%	80.000.000	100%	177.350.000	100%	235.476.000	100%	244.049.000	100%	246.727.000	100%	254.243.000	Biro Organisasi

1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0	0	1 Unit Motor (R2)	27.350.000	3 Unit R2 (Motor)	80.476.000	3 Unit R2 (Motor)	86.049.000	3 Unit R2 (Motor)	86.727.000	3 Unit R2 (Motor)	92.243.000	Biro Organisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	170.000.000	10 Unit	80.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	155.000.000	10 Unit	158.000.000	10 Unit	160.000.000	10 Unit	162.000.000	Biro Organisasi
1.6. 161. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.660.000	100%	214.645.600	100%	100.000.000	100%	55.239.469	100%	68.873.490	100%	104.045.564	100%	110.000.000	Biro Organisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	431.660.000	1 Dok.	214.645.600	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	55.239.469	1 Dok.	68.873.490	1 Dok.	104.045.564	1 Dok.	110.000.000	Biro Organisasi
1.7.1.7.1. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000	100%	178.500.000	100%	128.500.000	100%	128.500.000	100%	134.000.000	100%	137.000.000	100%	141.000.000	Biro Organisasi
1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemerintahan Aset Tak Berwujud yang dipelihara	40.000.000	5 Aplikasi	120.000.000	5 Aplikasi	70.000.000	5 Aplikasi	70.000.000	5 Aplikasi	73.000.000	5 Aplikasi	75.000.000	5 Aplikasi	76.000.000	Biro Organisasi
Program Penataan Organisasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25.000.000	1 Paket	58.500.000	1 Paket	58.500.000	1 Paket	58.500.000	1 Paket	61.000.000	1 Paket	62.000.000	1 Paket	65.000.000	Biro Organisasi
	INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI	1.081.860.000	30	918.544.600	37	918.544.600	40	1.056.326.290	42	1.099.064.333	45	1.156.691.727	46	1.231.033.803	Biro Organisasi
2.1.2.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	330.000.000	100%	317.460.000	100%	317.460.000	100%	433.326.290	100%	454.064.333	100%	489.691.727	100%	542.033.803	Biro Organisasi
2.1.2. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	80.000.000	1 Dok.	80.560.000	1 Dok.	80.560.000	1 Dok.	191.326.290	1 Dok.	204.064.333	1 Dok.	232.691.727	1 Dok.	278.033.803	Biro Organisasi
2.1.3. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	80.000.000	1 Dok.	76.900.000	1 Dok.	76.900.000	1 Dok.	78.000.000	1 Dok.	80.000.000	1 Dok.	82.000.000	1 Dok.	84.000.000	Biro Organisasi
Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	170.000.000	2 Dok.	160.000.000	2 Dok.	160.000.000	2 Dok.	164.000.000	2 Dok.	170.000.000	2 Dok.	175.000.000	2 Dok.	180.000.000	Biro Organisasi
2.2. 2.2.1. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	751.860.000	100%	601.084.600	100%	601.084.600	100%	623.000.000	100%	645.000.000	100%	667.000.000	100%	689.000.000	Biro Organisasi
2.2.2. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.000.000	2 Dok.	142.070.000	2 Dok.	142.070.000	2 Dok.	145.000.000	2 Dok.	150.000.000	2 Dok.	155.000.000	2 Dok.	160.000.000	Biro Organisasi
2.2.3. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	321.860.000	2 Dok.	167.019.600	2 Dok.	167.019.600	2 Dok.	170.000.000	2 Dok.	175.000.000	2 Dok.	180.000.000	2 Dok.	182.000.000	Biro Organisasi
2.2.4. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	100.000.000	1 Dok.	77.860.000	1 Dok.	77.860.000	1 Dok.	90.000.000	1 Dok.	95.000.000	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	110.000.000	Biro Organisasi
2.2.5. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120.000.000	2 Dok.	128.135.000	2 Dok.	128.135.000	2 Dok.	130.000.000	2 Dok.	135.000.000	2 Dok.	140.000.000	2 Dok.	143.000.000	Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000	1 Dok.	86.000.000	1 Dok.	86.000.000	1 Dok.	88.000.000	1 Dok.	90.000.000	1 Dok.	92.000.000	1 Dok.	94.000.000	Biro Organisasi
JUMLAH TOTAL		2.750.469.790		2.099.063.400		2.099.063.400		2.272.541.759		2.364.486.823		2.488.464.291		2.648.401.116	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah													Biro Umum dan Perengkapan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.800.000		385.800.000		327.728.496		319.800.000		319.800.000		319.800.000		351.513.980	Biro Umum dan Perengkapan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	1 Dokumen	93.800.000	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	46.428.495	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	46.428.496	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	46.428.495	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	46.428.495	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA- SKPD	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	38.500.000	2 Dokumen	46.428.495	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000	2 Laporan	66.000.000	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		Biro Umum dan Perengkapan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	72.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.217.811.532	-	68.859.918.000	-	94.426.162.000		94.426.162.000		94.426.162.000	-	94.926.162.000	-	97.011.162.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67.032.811.532	475 orang	67.674.918.000	480 orang	93.448.162.000	487 orang	93.448.162.000	511 orang	93.448.162.000	515 orang	93.948.162.000	515 orang	95.948.162.000	Biro Umum dan Perengkapan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000.000	12 Dokumen	1.100.000.000	12 Dokumen	850.000.000	12 Dokumen	850.000.000	12 Dokumen	850.000.000	12 Dokumen	850.000.000	12 Dokumen	925.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	30.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	73.000.000	1 Laporan	73.000.000	1 Laporan	73.000.000	1 Laporan	73.000.000	1 Laporan	73.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	35.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.880.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000		2.080.000.000		2.140.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	1 Dokumen	1.650.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	140.000.000	Biro Umum dan Perengkapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	350.000.000	Biro Umum dan Perengkapan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.362.451.626		2.921.435.580		285.900.000		285.900.000		285.900.000		285.900.000		2.785.900.000	
Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1.176.551.626	1 Paket	2.535.535.580	-	-	-	-	-	-	1 Paket		1 Paket	2.500.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.900.000	4 Orang	185.900.000	5 Orang	185.900.000	4 Orang	185.900.000	4 Orang	185.900.000	3 Orang	185.900.000	3 Orang	185.900.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	15 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum dan Perlengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	25 Orang	200.000.000	25 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.839.001.100		36.571.000.000		38.621.000.000		34.371.000.000		34.371.000.000		34.371.000.000		41.671.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	900.000.000	15 Paket	800.000.000	10 Paket	350.000.000	7 Paket	400.000.000	7 Paket	400.000.000	7 Paket	400.000.000	7 Paket	500.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2.571.000.000	12 Paket	3.871.000.000	12 Paket	2.871.000.000	12 Paket	2.571.000.000	12 Paket	2.571.000.000	12 Paket	2.571.000.000	12 Paket	3.571.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	500.000.000	12 Paket	500.000.000	12 Paket	200.000.000	12 Paket	200.000.000	15 Paket	200.000.000	15 Paket	200.000.000	15 Paket	300.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.449.200.000	12 Laporan	22.000.000.000	12 Laporan	28.000.000.000	12 Laporan	24.000.000.000	12 Laporan	24.000.000.000	12 Laporan	24.000.000.000	12 Laporan	28.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.920.000.000	3 Laporan	9.000.000.000	3 Laporan	7.000.000.000	3 Laporan	7.000.000.000	3 Laporan	7.000.000.000	3 Laporan	7.000.000.000	3 Laporan	9.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400.000.000	6 Dokumen	400.000.000	6 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	300.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98.801.100	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.410.000.000		22.328.279.700		12.751.866.251		13.907.145.950		13.985.803.175		14.428.803.175		20.598.279.500	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4.880.000.000	R4 = 20 unit, R2 = 10 unit	7.798.279.700	R4 = 4 unit	3.600.000.000	R4 = 4 unit	4.755.279.700	R4 = 5 unit	4.833.936.925	R4 = 7 unit	5.276.936.925	R4 = 7 unit	7.598.279.500	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit		1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2.530.000.000	4 Paket	2.530.000.000	4 Paket	2.000.000.000	4 Paket	2.000.000.000	4 Paket	2.000.000.000	4 Paket	2.000.000.000	4 Paket	3.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	12.000.000.000	50 unit	12.000.000.000	50 unit	7.151.866.251	50 unit	7.151.866.250	50 unit	7.151.866.250	50 unit	7.151.866.250	50 unit	10.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.410.000.000		53.928.646.000		52.928.646.000		50.928.646.000		50.928.646.000		51.428.646.000		51.428.646.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	11.450.000.000	50 Laporan	13.000.000.000	50 Laporan	10.000.000.000	50 Laporan	10.000.000.000	50 Laporan	10.000.000.000	50 Laporan	10.000.000.000	50 Laporan	10.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17.700.000.000	36 Laporan	26.000.000.000	36 Laporan	28.000.000.000	36 Laporan	26.000.000.000	36 Laporan	26.000.000.000	36 Laporan	26.500.000.000	36 Laporan	26.500.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13.060.000.000	36 Laporan	14.708.646.000	36 Laporan	14.708.646.000	36 Laporan	14.708.646.000	36 Laporan	14.708.646.000	36 Laporan	14.708.646.000	36 Laporan	14.708.646.000	Biro Umum dan Perlengkapan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.244.020.374		63.830.394.252		69.329.683.753		41.597.685.150		42.597.685.150		43.226.659.835		44.251.185.684	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	284.000.000	2 unit	1.000.000.000	2 unit	802.000.000	2 unit	850.000.000	2 unit	850.000.000	2 unit	850.000.000	2 unit	850.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11.983.074.300	210 unit	12.983.074.300	210 unit	9.638.258.441	210 unit	9.638.258.400	210 unit	9.638.258.400	220 unit	9.638.258.400	220 unit	9.839.258.400	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara	800.000.000	50 unit	800.000.000	50 unit	600.000.000	50 unit	800.000.000	50 unit	800.000.000	50 unit	800.000.000	50 unit	800.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	33.105.126.122	18 aset bangunan dan gedung kantor	46.975.500.000	18 aset bangunan dan gedung kantor	57.017.605.360	18 aset bangunan dan gedung kantor	29.037.606.800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30.037.606.800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30.366.581.485	18 aset bangunan dan gedung kantor	31.190.107.334	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2.071.819.952	200 Unit	2.071.819.952	200 Unit	1.271.819.952	200 Unit	1.271.819.950	200 Unit	1.271.819.950	200 Unit	1.571.819.950	200 Unit	1.571.819.950	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.687.175.800		12.675.898.000		14.244.409.000		14.244.409.000		14.244.409.000		14.244.409.000		14.244.409.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	253.933.000	2 orang	2.171.437.000	2 orang	2.171.437.000	2 orang	2.171.437.000	2 orang	2.171.437.000	2 orang	2.171.437.000	2 orang	2.171.437.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	11.025.000	4 Orang	15.000.000	4 Orang	15.000.000	2 orang	15.000.000	2 orang	15.000.000	4 Orang	15.000.000	4 Orang	15.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	2.100.000.000	2 Orang	3.000.000.000	2 Orang	3.000.000.000	2 Orang	3.000.000.000	2 orang	3.000.000.000	2 Orang	3.000.000.000	2 Orang	3.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	8.322.217.800	2 Orang	7.489.461.000	2 Orang	9.057.972.000	2 Orang	9.057.972.000	2 Orang	9.057.972.000	2 Orang	9.057.972.000	2 Orang	9.057.972.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11.450.800.000		15.750.000.000		15.750.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		16.600.000.000		16.600.000.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	10.250.800.000	30 Paket	11.000.000.000	30 Paket	10.000.000.000	50 Paket	10.000.000.000	50 Paket	10.000.000.000	50 Paket	11.000.000.000	50 Paket	11.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	30 Paket	3.250.000.000	30 Paket	4.250.000.000	30 Paket	3.500.000.000	30 Paket	3.500.000.000	30 Paket	4.000.000.000	30 Paket	4.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	1.200.000.000	15 Paket	1.500.000.000	15 Paket	1.500.000.000	15 Paket	1.500.000.000	15 Paket	1.500.000.000	15 Paket	1.600.000.000	15 Paket	1.600.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	Jumlah	231.887.060.432		279.331.371.532		300.745.395.500		267.160.748.100		268.239.405.325		271.911.380.010		291.082.096.164	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah														Biro Humas dan Protokol
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Biro Humas dan Protokol
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.000.000		229.000.000		229.000.000		229.000.000		250.647.000		250.647.000	100%	250.647.000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.000.000	1 Dokumen	229.000.000	1 Dokumen	229.000.000	1 Dokumen	229.000.000	1 Dokumen	250.647.000	1 Dokumen	250.647.000	1 Dokumen	250.647.000	Biro Humas dan Protokol
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000		272.000.000		272.000.000		398.000.000		350.000.000		350.000.000	100%	400.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	320.000.000	2 paket	192.000.000	2 paket	192.000.000	1 paket	318.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	Biro Humas dan Protokol
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	Biro Humas dan Protokol
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	Biro Humas dan Protokol
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000		400.000.000		400.000.000		750.000.000		300.000.000	100%	700.000.000	100%	300.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	320.000.000	R4= 1 Unit	-	-	-	R4 = 1 Unit	350.000.000	-	-	R4 = 1 Unit	400.000.000	-	-	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	280.000.000	10 Unit	400.000.000	10 Unit	400.000.000	10 Unit	400.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	Biro Humas dan Protokol

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.386.000		276.950.000		390.050.000		390.050.000		390.050.000		390.050.000		390.050.000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	583.386.000	1 Laporan	196.950.000	1 Laporan	310.050.000	1 Laporan	310.050.000	1 Laporan	310.050.000	1 Laporan	310.050.000	1 Laporan	310.050.000	Biro Humas dan Protokol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000		110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		130.000.000	100%	130.000.000		130.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	25 Jenis	50.000.000	Biro Humas dan Protokol
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60.000.000	10Unit	60.000.000	10Unit	60.000.000	10Unit	60.000.000	10Unit	80.000.000	10Unit	80.000.000	10Unit	80.000.000	Biro Humas dan Protokol
Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	30.263.005.233		30.278.014.858		30.164.914.858		32.062.994.000		32.864.568.850		33.686.183.071		34.528.337.647	Biro Humas dan Protokol
Sub Penyiapan Materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	3.645.858.137	5 Dokumen	3.800.000.000	5 Dokumen	3.800.000.000	5 Dokumen	4.000.000.000	5 Dokumen	4.100.000.000	5 Dokumen	4.202.500.000	5 Dokumen	4.307.562.500	Biro Humas dan Protokol
Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2.677.696.872	1 Laporan	2.700.000.000	1 Laporan	2.700.000.000	1 Laporan	3.000.000.000	1 Laporan	3.075.000.000	1 Laporan	3.151.875.000	1 Laporan	3.230.671.875	Biro Humas dan Protokol
Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	23.939.450.224	1 Laporan	23.778.014.858	1 Laporan	23.664.914.858	1 Laporan	25.062.994.000	1 Laporan	25.689.568.850	1 Laporan	26.331.808.071	1 Laporan	26.990.103.272	Biro Humas dan Protokol
Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	9.000.573.625		9.700.000.000		9.700.000.000		10.100.000.000		10.332.500.000		10.570.812.500		10.815.082.812	Biro Humas dan Protokol
Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5.280.573.625	1 Laporan	5.500.000.000	1 Laporan	5.500.000.000	1 Laporan	5.700.000.000	1 Laporan	5.842.500.000	1 Laporan	5.988.562.500	1 Laporan	6.138.276.562	Biro Humas dan Protokol
Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	3.000.000.000	1 Laporan	3.500.000.000	1 Laporan	3.500.000.000	1 Laporan	3.600.000.000	1 Laporan	3.690.000.000	1 Laporan	3.782.250.000	1 Laporan	3.876.806.250	Biro Humas dan Protokol
Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	720.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	Biro Humas dan Protokol
JUMLAH		43.440.964.858		43.440.964.858		43.440.964.858		46.215.044.000		46.867.765.850		47.937.642.571		48.664.117.459	

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun.

Program Prioritas Pembangunan Daerah secara tidak langsung memiliki fungsi yaitu menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah, Mengarahkan program/kegiatan di Organisasi Perintahan Daerah agar terintegrasi dan fokus serta Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung ke masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 12 Program Strategis sebagai landasan utama pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Adapun 12 Program Strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Grtais Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
4. Pendidikan Yang Berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel

8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderful 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program-program prioritas daerah yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi menyeluruh. Dari 12 Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga program utama yaitu :

1. Sumsel Berintegritas dan Melayani;
2. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya; dan
3. 100.000 Sultan Muda Sumsel

Secara rinci Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait di kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	3	
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance) Responsive dan melayani	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance) Responsive dan melayani	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum dan HAM
			Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum dan HAM
	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya	Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK)	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
	100.000 Sultan Muda Sumsel	Memberikan bantuan dan memfasilitasi Moda Usaha dengan StartUp dan UMKM yang menggandeng Perbankan dan BUMN/BUMD	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Biro Perekonomian
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatnya Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Good and Clean Governance, Responsive dan Melayani)	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 3. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Adm. Pembangunan Biro Adm. Pembangunan Biro Adm. Pembangunan
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan meningkatkan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih Good and Governance (Responsive dan Melayani)	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan barang dan Jasa Biro Pengadaan barang dan Jasa
	SUMSEL BERINTEGRITAS DAN MELAYANI	Menciptakan Pemerintahan yang bersih (good dan clean governance)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			1. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Biro Organisasi
			Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
			2. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
			3. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
			4. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih Good and Clean Governance (Responsive dan Melayani)	Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance) Responsive dan melayani	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel

4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; 2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama; 3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan; 4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses; 5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; 6. Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah).

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut : a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah); b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); c. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dirancang untuk mencerminkan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2029) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2025-2029, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Dengan capaian IKU ini, Sekretariat Daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan langsung dalam mengawal keberhasilan RPJMD 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Pemekaran Kecamatan yang Difasilitasi	Jumlah	2	2	2	2	2	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Pilar Batas Daerah yang Terpasang	Jumlah	10	10	10	10	10	10	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.	Jumlah	26	31	36	41	46	51	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	6 Perda	6 Perda	6 Perda	Biro Hukum dan HAM
		Pergub	15 Pergub	15 Pergub	15 Pergub	16 Pergub	16 Pergub	16 Pergub	Biro Hukum dan HAM
		Perkara	8 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	Biro Hukum dan HAM
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
8	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
9	Meningkatnya Peringkat STQ/MTQ	besar	10	10	10	10	10	10	Biro Kesejahteraan Rakyat
10	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	%	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
11	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	%	100	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian
12	Indeks Reformasi Birokrasi	%	85%	87%	88%	90%	90%	90%	Biro Administrasi Pembangunan
13	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	70	72	74	76	80	81	Biro Pengadaan barang dan Jasa
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)	Biro Organisasi
15	Indeks Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan
16	Indeks Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	Biro Humas dan Protokol

4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kebermanfaatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci dirumuskan untuk setiap urusan pemerintahan dan mencerminkan capaian hasil yang diharapkan dari kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

Dalam periode perencanaan tahun 2026–2030, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja kunci yang mencerminkan fungsi strategis dalam mendukung koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pembangunan daerah. Setiap indikator dirancang dengan target capaian tahunan yang realistis, progresif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah	26	31	36	41	46	51	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum dan HAM
3	Meningkatnya Peringkat STQ/MTQ	Besar	10	10	10	10	10	10	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BIRO PEREKONOMIAN
5	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Biro Administrasi Pembangunan
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	Level 3	Level 3	Level 3 Pusat Keunggulan Pengadaan	Level 3 Pusat Keunggulan Pengadaan	Level 4	Level 4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	54%	55%	56%	57%	58%	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25%	26%	27%	28%	30%	35%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
9	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
10	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
11	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
12	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	30	37	40	42	45	46	Biro Organisasi
13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan
14	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Biro Humas dan Protokol

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini Adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga tidak sama dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2030. Dan juga dengan mempertimbangkan hasil kajian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sasaran, Program, dan kegiatan Pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama Adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (Prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan, September 2025
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

EDWARD CANDRA, MH